

**PERAN AKTOR DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK
(Studi pada Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah)**

(Tesis)

Oleh:

**IRANDA PUTRI
NPM 1926061004**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

PERAN AKTOR DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK (Studi pada Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah)

Oleh

IRANDA PUTRI

Pemerataan akses dan mutu pendidikan merupakan salah satu amanat dari UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menindaklanjuti pernyataan tersebut melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 20 Tahun 2019 lahir sebuah kebijakan bernama Sistem Zonasi Sekolah. Penelitian ini berfokus pada kebijakan Sistem Zonasi Sekolah lingkup SMA di Provinsi Lampung. Tujuan penelitian adalah mengetahui tingkat kepentingan peran aktor dalam implementasi kebijakan Sistem Zonasi Sekolah. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif.

Pengolahan data menggunakan *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Menggunakan teori Edward III untuk variabel implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sebagai kriteria penelitian. Aktor implementasi terdiri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Majelis Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Lampung, DPRD Provinsi Lampung, Dewan Pendidikan Lampung, Ikatan Guru Indonesia (IGI) Lampung, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Lampung, Dosen Manajemen Pendidikan dan pengamat kebijakan pendidikan yang berdasarkan teori Thompson terbagi menjadi empat kelompok yaitu *Key Players*, *Contest Setter*, *Subject* dan *Other Followers*.

Hasil penelitian menunjukkan tingkat kepentingan variabel implementasi adalah; struktur birokrasi, sumber daya, komunikasi dan disposisi. Sementara itu, tingkat kepentingan aktor implementasi adalah; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Majelis Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Lampung, DPRD Provinsi Lampung, Dewan Pendidikan Lampung, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Lampung, Ikatan Guru Indonesia (IGI) Lampung, Dosen Manajemen Pendidikan dan pengamat kebijakan pendidikan.

Kata Kunci: Aktor Implementasi, Kebijakan Zonasi, Variabel Implementasi.

ABSTRACT

ROLE OF ACTORS IN THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC POLICY (Study on School Zoning System Policy)

By

IRANDA PUTRI

Equalization of access and quality of education is one of the mandates of Law Number 20 of 2013 on the National Education System. Follow up on the statement through the Regulation of the Minister of Education and Culture Number 20 of 2019 a policy was born called School Zoning System. This research focuses on the policy of school zoning system in Lampung province. The purpose of the study was to determine the level of importance of the role of actors in the implementation of school zoning system policies. This type of research is descriptive qualitative. Data processing use Analytical Hierarchy Process (AHP). Using Edward III's theory for implementation variables namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure as research criteria. The implementation actors consist of the Lampung Provincial Education and Culture Office, Lampung School Principal Working Assembly (MKKS), Lampung Provincial Parliament (DPRD), Lampung Board of Education (DPL), Indonesian Teachers Association (IGI) Lampung, Lampung Education Quality Assurance Institute (LPMP), Lecturer of Education Management and observers of education policy based on Thompson's theory are divided into four groups namely Key Players, Contest Setter, Subject and Other Followers. The results showed the importance of implementation variables is; bureaucratic structure, resources, communication and disposition. Meanwhile, the importance of actors is; Department of Education and Culture of Lampung Province, Working Council of Principals (MKKS) of Lampung, Lampung Provincial Parliament (DPRD), Board of Education of Lampung (DPL), Lampung Education Quality Assurance Institute (LPMP), Indonesian Teachers Association (IGI) Lampung, Lecturer in Education Management and observer of education policy.

Key words: Implementation actors, Implementation variables, Zoning policies.

**PERAN AKTOR DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK
(Studi pada Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah)**

Oleh:

IRANDA PUTRI

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER SAINS**

Pada

**Jurusan Magister Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

Judul Tesis : **PERAN AKTOR DALAM IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN PUBLIK
(Studi pada Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah)**

Nama Mahasiswa : *Iranda Putri*

Nomor Pokok Mahasiswa : 1926061004

Program Studi : Magister Ilmu Administrasi

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

Komisi Pembimbing

[Signature]
Prof. Dr. Yulianto, M.Si.
NIP. 196107041988031005

[Signature]
Intan Fitri Meutia, Ph.D.
NIP. 198506202008122001

MENGETAHUI

Plt. Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung

[Signature]
Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.
NIP. 197507202003121002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Yulianto, M.Si.**

Sekretaris : **Intan Fitri Meutia, Ph.D.**

Penguji : **Dr. Bambang Utoyo S, M.Si.**

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2001

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.
NIP. 19710415 199803 1005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 18 Juni 2021

SURAT PERNYATAAN

Dengan karya ini saya menyatakan bahwa:

1. Tesis dengan judul: PERAN AKTOR DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK (Studi pada Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah) adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiatisme.
2. Hal intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Juni 2021



Iranda Putri
NPM. 1926061004

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Iranda Putri, dilahirkan di Bandar Lampung pada 28 Desember 1996. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara putri dari Bapak H. Ichsan Solihin dan Hj. Herida Dahlia, S.Pd. Jenjang pendidikan penulis dimulai dari tahun 2001-2002 di TK Kartika II-27 Bandar Lampung, dilanjutkan di SD Kartika II-5 Bandar Lampung pada tahun 2002-2008. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama di RSBI SMPN 1 Bandar Lampung tahun 2008-2011.

Penulis melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMAN 12 Bandar Lampung tahun 2011 kemudian pindah ke SMAN 9 Bandar Lampung tahun 2012. Selanjutnya pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN dan dinyatakan sebagai seorang Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Februari 2018 dengan predikat pujian (*cumlaude*) dan juga termasuk ke dalam lulusan terbaik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Sejak tahun 2019 hingga kini, penulis bekerja di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung.

MOTTO

“Fainna ma'a al'usri yusran. Inna ma'a al'usri yusran”

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(QS Al-Insyriah [94]: 5-6)

“Amalan yang dicintai Allah adalah yang terus-menerus walaupun sedikit”

(HR Bukhari dan Muslim)

*“When you succeed, you earn something. When you fail, you also earn something.
You need both in your life”*

(Dr. Bilal Philips)

“Keberhasilan adalah sebuah istana, ridho Allah adalah atapnya, doa ibu dan ayah adalah tiangnya, kasih sayang keluarga adalah fondasinya dan usaha serta semangat diri sendiri adalah pintu masuknya”

(Iranda Putri)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamduillahirabbil'alamiin telah Engkau ridhai Ya Allah langkah hamba Mu,
sehingga Tesis ini pada akhirnya dapat diselesaikan tepat waktu

Teriring shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW
Semoga kelak Tesis ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat

dan

Ku persembahkan karya Sederhana ini kepada:

Ayahanda dan Ibunda tercinta serta kakakku dan adikku yang ku sayangi sebagai
tanda bakti, hormat dan cintaku.

Terimakasih atas doa dan restu serta semangat yang telah kalian berikan, semoga
amal kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT

Almamater Tercinta Universitas Lampung

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur atas keridhoan Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam tidak lupa penulis sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik dan pemimpin bagi kaumnya. Tesis yang berjudul “Peran Aktor Dalam Implementasi Kebijakan Publik (Studi pada Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah)” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains, Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini antara lain, yaitu:

1. Ibunda dan Ayahanda tercinta, H. Ichsan Solihin dan Hj. Herida Dahlia, S.Pd atas segala doa, cinta dan kasih sayang, dukungan dan semangat serta perhatian yang terus mengalir dan tak mampu penulis balas segala jasa dan kebaikannya, Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan, kesehatan dan kasih sayang-Nya serta balasan atas segala jasa dan kebaikan Ibunda dan Ayahanda.
2. Kakak dan adik kandung penulis, Novi Yanti, S.P., M.Si. dan Purnna Praja IPDN XXVIII Muhammad Irvan, S.Tr.IP. serta kakak ipar penulis, Akhmad Mirza Kurniawan, S.H dan dua orang keponakan penulis, Fathir Raqilla Dzakwan dan Queenzha Atha Shaquila. Terima kasih atas segala doa dan semangat serta cinta dan kasih sayang yang diberikan, semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan, kekuatan dan kemudahan dalam segala urusan sehingga kita mampu menjadi anak yang membanggakan orang tua kita.

3. Bapak Dr. Nur Efendi, M.Si. selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, nasihat, semangat dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis. Semoga Bapak senantiasa diberi kesehatan dan keberkahan oleh Allah SWT.
4. Prof. Dr. Yulianto, M.Si. selaku Pembimbing Akademik dan Pembimbing Utama penulis yang telah memberikan arahan, nasihat, semangat, dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis. Terima kasih telah menginspirasi, memberi dukungan, tetap rendah hati dan menjadi pribadi yang menyenangkan bagi penulis, semoga Prof senantiasa diberi kesehatan dan keberkahan oleh Allah SWT. Semoga penulis mampu memiliki gelar dan ilmu setara dengan Prof suatu saat nanti.
5. Ibu Intan Fitri Meutia, Ph.D. selaku Pembimbing Kedua penulis yang juga sangat berjasa bagi penulisan karya tulis ini. Terima kasih telah dengan sabar menghadapi keterbatasan pengetahuan penulis hingga terciptanya karya tulis yang sangat luar biasa bagi penulis. Terima kasih atas segala arahan, nasihat, semangat, dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis, semoga ibu senantiasa diberi kesehatan dan keberkahan oleh Allah SWT. Semoga penulis mampu menjadi sosok seperti ibu yang selama ini sangat menginspirasi bagi penulis bahwa wanita juga bisa menempuh pendidikan hingga setinggi-tingginya dan berkarya dengan kemampuannya.
6. Bapak Dr. Bambang Utoyo S, M.Si. selaku Pembahas pada karya tulis ini yang telah memberikan arahan, nasihat, semangat, dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini secara maksimal. Terima kasih atas masukan ilmu bagi penulis yang sangat bermanfaat. Semoga bapak senantiasa diberi kesehatan dan keberkahan oleh Allah SWT. Semoga penulis mampu menempuh jenjang pendidikan seperti bapak dan tetap menjadi sosok yang menyenangkan seperti bapak.
7. Seluruh dosen Magister Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Terima kasih atas segala ilmu yang diberikan kepada penulis yang tentunya sangat bermanfaat. Semoga bapak dan ibu senantiasa diberi kesehatan dan keberkahan oleh Allah SWT.

8. Seluruh dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung yang pernah mengajar penulis semasa studi S1, terima kasih atas segala ilmu yang diberikan yang menjadi bekal bagi penulis untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Semoga bapak dan ibu senantiasa diberi kesehatan dan keberkahan oleh Allah SWT.
9. Teman-teman MIA 2019, Wiryawan, Mike, Anggun, Defita, Mba Mira, Mba Erma, Mba Imah, Mba Yuda, Mba Neti, Bang Iswan, Mba Meri, Mba Sasa, Vera, Ibnu, Bang Olaf, Mba Imas, Mba Lovi dan Mba Dini. Terima kasih atas kenangan dan keceriaan selama hampir dua tahun kebersamaan. Tetap semangat melanjutkan tesis hingga mencapai gelar M.Si. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan keberkahan dan kemudahan di bagi teman-teman sekalian, sampai bertemu di titik terbaik menurut Allah SWT.
10. Rekan seperjuangan ku, adik ku, Khairunnisa Maulida, S.IP yang sebentar lagi akan menambah gelar menjadi M,IP. Tetap semangat lanjutkan tesis mu karena perjuangan tidak berhenti sampai disini. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan keberkahan dan kemudahan di setiap perjalanan mu.
11. Abang ku, Rifky Febrihanuddin Azis, S,IP., M.Si. selaku kakak tingkatku dari S1 hingga S2 yang selalu menginspirasi dan menjadi tempat bertukar pikiran. Terima kasih atas segala nasihat dan inspirasi, semoga Allah SWT memberikan kesehatan keberkahan dan kemudahan di setiap perjalanan mu.
12. Rifaldi, A.Md. Tra. Selaku sosok yang selalu ada bagi penulis. Terima kasih atas kehadiran mu yang sangat berarti bagi hidup penulis, atas segala kesabaran yang tak pernah redup, atas semangat yang tak pernah sulut, dan usaha mu yang membuat hari-hari penulis terasa hidup. Semoga Allah SWT memberikan mu kesehatan, keberkahan dan kelancaran bagi hidup mu dan diberikan perlindungan dimanapun kau berada. Semoga apa yang kau impikan dan kita rencanakan dapat tercapai dengan baik, aamiin.

Bandar Lampung, Juni 2021

Iranda Putri

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Tinjauan tentang Kebijakan Publik.....	8
2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik.....	9
2.1.2 Tingkatan Kebijakan Publik.....	11
2.1.3 Implementasi Kebijakan Publik.....	12
2.1.4 Variabel Implementasi Kebijakan.....	20
2.2 Tinjauan tentang Aktor Implementasi Kebijakan Publik.....	23
2.2.1 Tipe Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik.....	24
2.2.2 Karakteristik Interaksi Aktor Pelaksana Kebijakan.....	27
2.2.3 Tipologi Interaksi Aktor.....	28
2.3 Tinjauan tentang Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah.....	30
2.3.1 Pengertian Sistem Zonasi.....	30
2.3.2 Pentingnya Sistem Zonasi.....	31
2.3.3 Tujuan Sistem Zonasi.....	32
2.3.4 Regulasi Sistem Zonasi.....	33
2.4 Penelitian Terdahulu.....	33
2.5 Kerangka Pikir Penelitian.....	36
2.6 Hipotesis.....	39
III. METODE PENELITIAN	41
3.1 Tipe Penelitian.....	41
3.2 Fokus dan Lokus Penelitian.....	42
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	42

3.3.1	Data Primer	42
3.3.2	Data Sekunder	42
3.4	Informan Penelitian	43
3.5	Instrumen Penelitian	46
3.6	Teknik Pengambilan Data	46
3.6.1	Wawancara dan Kuesioner	46
3.6.2	Observasi	47
3.7	Analisis Data.....	47
3.7.1	<i>Analytical Hierarchy Process</i> (AHP).....	47
3.7.2	Tahapan <i>Analytical Hierarchy Process</i> (AHP).....	52
IV.	GAMBARAN UMUM PENELITIAN.....	65
4.1	Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah Provinsi Lampung Tahun 2019	65
4.2	Prinsip Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat SMA Provinsi Lampung.....	67
4.3	Penyelenggara serta Tugas dan Wewenang Penyelenggara dalam Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat SMA Provinsi Lampung.....	67
4.4	Jumlah Batas Kecamatan dan Daya Tampung di tiap Kota/Kabupaten Tingkat SMA Provinsi Lampung.....	68
V.	HASIL DAN PEMBAHASAN	70
5.1	Tahapan Awal Mengolah Data <i>Analytical Hierarchy Process</i> (AHP)	70
5.1	Mendefinisikan Masalah dan Menentukan Solusi.....	70
5.2	Membuat Struktur Hierarki yang Diawali dengan Tujuan Utama	72
5.2	Hasil Olah Data Variabel Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah.....	73
5.2.1	Hierarki Variabel Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah	73
5.2.2	Menguji Konsistensi Hasil Variabel Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah	74
5.3	Hasil Olah Data Aktor Implementasi terhadap Variabel Implementasi	75
5.3.1	Hierarki Aktor Implementasi terhadap Variabel Implementasi	75
5.3.2	Menguji Konsistensi Hasil Aktor Implementasi terhadap Variabel Implementasi.....	82
5.4	Hasil Akhir Hierarki Kepentingan Peran Aktor Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah	85
5.4.1	Kategori Aktor: <i>Key Players</i>	86
5.4.2	Kategori Aktor: <i>Contestsetter</i>	86
5.4.3	Kategori Aktor: <i>Subject</i>	87
5.4.4	Kategori Aktor: <i>Other Followers</i>	87
5.5	Pembahasan Kriteria: Variabel Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah.....	88

5.5.1	Kriteria: Struktur Birokrasi sebagai Variabel Implementasi Pertama	89
5.5.2	Kriteria: Sumber Daya sebagai Variabel Implementasi Kedua.....	91
5.5.3	Kriteria: Komunikasi sebagai Variabel Implementasi Ketiga.....	93
5.5.4	Kriteria: Disposisi sebagai Variabel Implementasi Keempat.....	95
5.6	Pembahasan Alternatif terhadap Kriteria: Aktor Implementasi terhadap Variabel Implementasi.....	97
5.6.1	Alternatif terhadap Kriteria: Aktor Implementasi terhadap Variabel Komunikasi.....	97
5.6.2	Alternatif terhadap Kriteria: Aktor Implementasi terhadap Variabel Sumber Daya.....	100
5.6.3	Alternatif terhadap Kriteria: Aktor Implementasi terhadap Variabel Disosiasi.....	103
5.6.4	Alternatif terhadap Kriteria: Aktor Implementasi terhadap Variabel Struktur Birokrasi.....	105
5.7	Pembahasan Akhir: Hierarki Kepentingan Peran Aktor Dalam Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah	108
5.7.1	Aktor Implementasi Kebijakan: <i>Key Players</i>	109
5.7.2	Aktor Implementasi Kebijakan: <i>Contestsetter</i>	111
5.7.3	Aktor Implementasi Kebijakan: <i>Subject</i>	112
5.7.4	Aktor Implementasi Kebijakan: <i>Other Followers</i>	113
VI.	SIMPULAN DAN SARAN	115
6.1	Simpulan.....	115
6.2	Saran	117

DAFTAR PUSTAKA

KUISIONER

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jumlah Sekolah di Provinsi Lampung.....	4
Tabel 2. Hasil Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi SMA di Provinsi Lampung Tahun 2019	5
Tabel 3. Manajemen Kegiatan Implementasi Kebijakan Publik.....	17
Tabel 4. Penelitian Terdahulu	34
Tabel 5. Informan Penelitian	44
Tabel 6. Matriks Perbandingan Berpasangan Dalam Penelitian	55
Tabel 7. Skala Perbandingan Berpasangan Dalam Penelitian	56
Tabel 8. Jumlah Normalisasi Variabel Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah	58
Tabel 9. Jumlah Normalisasi Aktor Implementasi terhadap Variabel Komunikasi.....	58
Tabel 10. Jumlah Normalisasi Aktor Implementasi terhadap Variabel Sumber Daya.....	58
Tabel 11. Jumlah Normalisasi Aktor Implementasi terhadap Variabel Disposisi.....	59
Tabel 12. Jumlah Normalisasi Aktor Implementasi terhadap Variabel Struktur Birokrasi.....	59
Tabel 13. Rata-rata Normalisasi Variabel Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah	60
Tabel 14. Rata-rata Normalisasi Aktor Implementasi terhadap Variabel Komunikasi	60
Tabel 15. Rata-rata Normalisasi Aktor Implementasi terhadap Variabel Sumber Daya.....	61
Tabel 16. Rata-rata Normalisasi Aktor Implementasi terhadap Variabel Disposisi	61
Tabel 17. Rata-rata Normalisasi Aktor Implementasi terhadap Variabel Struktur Birokrasi	62
Tabel 18. Lamda Maksimal (t) tiap Elemen	63
Tabel 19. <i>Consistency Indec</i> (CI) tiap Elemen	63
Tabel 20. <i>Consistency Ratio</i> (CR) tiap Elemen	64
Tabel 21. Jumlah Batas Kecamatan dan Daya Tampung tiap Kota/Kabupaten Tingkat SMA Provinsi Lampung	69
Tabel 22. Pemetaan Masalah dan Solusi Dalam Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah	71

Tabel 23. <i>Eigen Vector</i> Variabel Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah	73
Tabel 24. <i>Eigen Vector</i> Aktor Implementasi terhadap Variabel Komunikasi.....	76
Tabel 25. <i>Eigen Vector</i> Aktor Implementasi terhadap Variabel Sumber Daya	77
Tabel 26. <i>Eigen Vector</i> Aktor Implementasi terhadap Variabel Disposisi	79
Tabel 27. <i>Eigen Vector</i> Aktor Implementasi terhadap Variabel Struktur Birokrasi	80
Tabel 28. Hasil Akhir Hierarki Kepentingan Peran Aktor Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah	86

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Implementasi Kebijakan Publik.....	21
Gambar 2. Kerangka Pikir Penelitian.....	38
Gambar 3. Struktur Hierarki Dalam Penelitian	54
Gambar 4. Tujuan, Kriteria dan Alternatif Penelitian	72
Gambar 5. Hierarki Kepentingan Variabel Implementasi	88
Gambar 6. Hierarki Aktor Implementasi terhadap Variabel Komunikasi.....	97
Gambar 7. Hierarki Aktor Implementasi terhadap Variabel Sumber Daya	100
Gambar 8. Hierarki Aktor Implementasi terhadap Variabel Disposisi	103
Gambar 9. Hierarki Aktor Implementasi terhadap Variabel Struktur Birokrasi	105
Gambar 10. Hierarki Kepentingan Peran Aktor Implementasi Kebijakan	109

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebijakan publik sebagai ilmu, secara historis baru muncul pada pertengahan dasawarsa 1960-an dan relatif baru karena sebagai sebuah disiplin. Sejak itu, kebijakan publik tidak terpisahkan dari kehidupan manusia dalam bentuk tataran mikro individual maupun konteks tataran makro dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Wahab, 2012). Dalam berbagai tingkatan proses kebijakan seperti formulasi, implementasi dan evaluasi akan melibatkan banyak peran individu maupun kelompok, mereka yang melibatkan diri berperan dalam sebuah proses kebijakan dikenal dengan aktor kebijakan.

Menurut Agustino, Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, pelaksana implementasi berbentuk aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri (Purwanto dan Sulistyastuti., 1991). Implementasi kebijakan sendiri harus secara mutlak melibatkan aktor-aktor yang perannya mempengaruhi hasil akhir kebijakan. Sebagaimana dinyatakan para terdahulu bahwa keterlibatan aktor dalam proses kebijakan tidaklah bebas nilai atau bebas dari kepentingan (Handayani dan Warsono, 2017)

Kajian terhadap aktor perumus dan pelaksana kebijakan merupakan hal yang penting. Para aktor merupakan penentu isi kebijakan dan pemberi warna dinamika tahapan-tahapan proses kebijakan (Lester, 2000). Thompson mengungkapkan bahwa peran aktor dalam pelaksanaan suatu kebijakan

dipengaruhi oleh kekuatan (*power*) dan kepentingan (*interest*) yang dimiliki oleh aktor tersebut, perbedaan tinggi dan rendahnya kekuatan dan kepentingan akan menghasilkan empat kategori aktor yaitu *key players*, *contest setter*, *subject* dan *other followers* (Edward III, 1990)

Sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi : (1) setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Makna ayat 1 pasal 31 UUD 1945 tersebut bahwa pendidikan berhak didapatkan setiap warga negara tanpa terkecuali. Memperoleh pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis agama, dan gender. Pemerintah berupaya untuk memberikan pendidikan kepada seluruh warga Negara melalui pemerataan akses pendidikan.

Adanya pemerataan akses pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (*life skills*) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Keberhasilan meningkatkan akses pendidikan berdampak positif terhadap kualitas SDM dan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan akses pendidikan ditunjukkan dengan meningkatnya partisipasi penduduk usia sekolah yang mendapat pendidikan. Penuntasan akses pendidikan merupakan prioritas pembangunan pendidikan di Indonesia. Selain peningkatan akses pendidikan, pemerataan mutu pendidikan juga sedang diprogramkan pemerintah.

Berkaitan dengan kondisi mutu pendidikan, terlihat masih belum meratanya mutu pendidikan di Indonesia. Mengingat urgensi dari pemerataan akses dan mutu pendidikan, maka pemerintah menjalankan kebijakan zonasi pendidikan. Implementasi kebijakan zonasi pendidikan merupakan terobosan lain dalam menjabarkan upaya pemerintah melakukan pemerataan akses dan mutu pendidikan. Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu area menjadi

beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan. Sistem zonasi dalam pendidikan merupakan landasan pokok penataan reformasi sekolah secara keseluruhan mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

Diawali dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017, kemudian peraturan ini diperbaharui menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 dan pada tahun 2019 diperbaharui kembali menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019, ketiga peraturan ini sama-sama membahas tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat.

Kebijakan PPDB berbasis zonasi merupakan salah satu kebijakan yang tepat untuk pemerataan akses dan mutu pendidikan karena prinsipnya adalah mendekatkan layanan pendidikan ke masyarakat dan meratakan mutu pendidikan. Mengingat pentingnya kebijakan tersebut maka disusunlah Peraturan PPDB Zonasi. Peraturan PPDB memberi konsekuensi jangka panjang bahwa zonasi pendidikan akan menjadikan semua sekolah memiliki kedudukan, peran, dan fungsi yang sama dalam melayani setiap peserta didik. Sistem PPDB zonasi juga menekankan bagaimana setelah siswa menyebar kemudian ada pemerataan kesempatan mendapatkan pendidikan yang berkualitas, merata ke setiap wilayah, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat (Perdana, 2019).

Sistem PPDB zonasi mengatur sekolah negeri milik pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 80% (delapan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Radius zona terdekat ditetapkan pemerintah daerah sesuai dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut dan daya rombongan belajar pada setiap sekolah. Namun demikian, sekolah dapat menerima peserta didik baru di luar zona terdekat karena alasan

prestasi paling banyak 15% dan paling banyak 5% karena alasan khusus, misalnya perpindahan domisili orang tua/wali (Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019).

Sebagai bagian dari Indonesia, Provinsi Lampung memiliki 15 Kabupaten/Kota dengan cukup banyak sarana pendidikan dimulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD)/ sederajat hingga Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat. Penelitian ini berfokus pada Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat di Provinsi Lampung sebab SMA di Provinsi Lampung memiliki jumlah paling rendah jika dibandingkan dengan jumlah SD maupun SMP, sedangkan PPDB Zonasi hanya ditujukan untuk sekolah negeri milik pemerintah daerah, hal ini tentunya akan lebih mempersempit pilihan para calon siswa SMA di Provinsi Lampung untuk menentukan sekolah yang mereka inginkan berdasarkan sistem zonasi. Berikut adalah data jumlah sekolah di Provinsi Lampung dan sebaran hasil PPDB Zonasi tingkat SMA di Provinsi Lampung tahun 2019:

Tabel 1. Jumlah Sekolah di Provinsi Lampung

No	Sekolah	Kategori		Jumlah
		Negeri	Swasta	
1	SD	4410	1116	5526
2	SMP	734	1378	2112
3	SMA	110	375	485
Total				8954

Sumber: (Kemendikbud, 2019a)

Tabel 2. Hasil Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi SMA di Provinsi Lampung Tahun 2019

No	Kabupaten/ Kota	Daya Tampung		Jarak Rumah ke Sekolah			
		Paling Rendah	Paling Tinggi	IPA		IPS	
				Paling Dekat	Paling Jauh	Paling Dekat	Paling Jauh
1	Kabupaten Lampung Selatan	126 siswa	385 siswa	7 meter	29603 meter	7 meter	24649 meter
2	Kabupaten Lampung Tengah	141 siswa	432 siswa	8 meter	96526 meter	19 meter	991865 meter
3	Kabupaten Lampung Utara	68 siswa	328 siswa	6 meter	40287 meter	2 meter	39441 meter
4	Kabupaten Lampung Barat	40 siswa	273 siswa	12 meter	28149 meter	28 meter	87579 meter
5	Kabupaten Tulang Bawang	104 siswa	252 siswa	0 meter	138399 meter	21 meter	694172 meter
6	Kabupaten Tanggamus	64 siswa	310 siswa	35 meter	31148 meter	35 meter	31416 meter
7	Kabupaten Lampung Timur	144 siswa	325 siswa	0 meter	727812 meter	7 meter	863889 Meter
8	Kabupaten Way Kanan	60 siswa	321 siswa	0 meter	1123390 meter	0 meter	228731 Meter
9	Kota Bandar Lampung	144 siswa	428 siswa	12 meter	17027 meter	17 meter	7550 Meter
10	Kota Metro	263 siswa	330 siswa	62 meter	14401 meter	95 meter	41453 Meter
11	Kabupaten Pesawaran	107 siswa	390 siswa	51 meter	30683 meter	73 meter	38797 Meter
12	Kabupaten Mesuji	172 siswa	200 siswa	9 meter	50688 meter	9 meter	628128 Meter
13	Kabupaten Pringsewu	180 siswa	354 siswa	34 meter	77673 meter	22 meter	35569 Meter
14	Kabupaten Tulang Bawang Barat	30 siswa	336 siswa	5 meter	20484 meter	4 meter	33487 Meter
15	Kabupaten Pesisir Barat	105 siswa	314 siswa	16 meter	2209410 meter	16 meter	662405 Meter

Sumber: (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, 2019)

Dikaitkan dengan studi kasus PPDB zonasi tingkat SMA di Provinsi Lampung, maka aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini adalah; perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, perwakilan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Lampung, perwakilan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Dewan Pendidikan Lampung, perwakilan Ikatan Guru Indonesia (IGI) Lampung, perwakilan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Lampung, Dosen Pascasarjana Manajemen Pendidikan FKIP Unila, Pengamat Kebijakan Pendidikan sebagai subjek penelitian. Peran para aktor ini akan dikaji lebih lanjut dan peneliti berusaha menemukan siapa aktor yang memiliki peran paling dominan sesuai dengan variabel implementasi yang ada dalam menunjang keberhasilan implementasi kebijakan Sistem Zonasi Sekolah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana peran aktor kebijakan publik dalam implementasi kebijakan Sistem Zonasi Sekolah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah untuk: Mendeskripsikan bagaimana peran aktor kebijakan publik dalam implementasi kebijakan Sistem Zonasi Sekolah.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Sebagai referensi tambahan khasanah ilmu administrasi publik dalam hal peran aktor dominan dalam implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan:

- a. Mampu menjadi salah satu bahan referensi bagi aktor-aktor yang terlibat dalam kebijakan Sistem Zonasi Sekolah untuk meninjau kembali beberapa hal yang harus diperbaiki dalam hal kebijakan Sistem Zonasi Sekolah terutama pada bagian implementasi.
- b. Mampu menjadi tambahan informasi bagi pembaca/ masyarakat luas tentang bentuk dari peran aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan Sistem Zonasi Sekolah bahwa ada beberapa bentuk peran aktor yang selama ini tidak terlihat sebab kontribusi mereka berada di belakang layar.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Kebijakan Publik

Kebijakan menurut Dye adalah apa yang dilakukan atau yang tidak dilakukan oleh pemerintah (Dye, 1978). Apa pun yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk kepentingan publik atau masyarakat adalah bagian dari kebijakan publik. Sementara, Eyestone mengemukakan bahwa kebijakan adalah hubungan pemerintah dengan unit-unit dalam lingkungan pemerintahan. Hubungan antara unit-unit dalam lembaga pemerintah adalah sebagai bentuk dari kebijakan yang bersumber secara *top-down* (Eyestone, 1971). Setiap atasan mempunyai kebijakan yang harus dilaksanakan oleh bawahan, baik secara kelembagaan ataupun personal. Kebijakan berbentuk korelasi antar unsur dan lembaga.

Carl J Federick mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Agustino, 2012). Wilson mengemukakan bahwa kebijakan itu tindakan objektif dan pernyataan pemerintah pada hal-hal tertentu, langkah-langkah yang mereka ambil untuk melaksanakannya, dan penjelasan yang mereka berikan tentang apa yang terjadi atau tidak terjadi (Wilson, 1989).

2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Pakar Inggris, W.I. Jenkins merumuskan kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut (Jenkins, 1978). Seorang pakar dari Nigeria, Chief J.O. Udoji mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang saling berkaitan dan mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat (Udoji, 1981).

Sementara itu Parsons, memberikan gagasan tentang kebijakan adalah sebagai seperangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan politik. Menurutnya, kata *policy* mengandung makna kebijakan sebagai *rationale*, sebuah manifestasi dari penilaian pertimbangan. Artinya sebuah kebijakan adalah usaha untuk mendefinisikan dan menyusun basis rasional untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan (Parsons, 2006). Syafiie mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi, dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah (Syafiie, 2006).

Eyestone mendefinisikan kebijakan publik sebagai hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya (Agustino, 2012). Pressman dan Widavsky mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan, kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor non pemerintah (Winarno, 2012). Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat (Easton, 1953). Laswell

dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah (Lasswell, H.D dan Kaplan, 1970).

Jenkins melihat kebijakan yang terbatas kekuasaan, Udoji menilai kebijakan adalah sarana yang saling berkaitan, dan Parsons memahami kebijakan sebagai cara yang terstruktur. Ketiganya sama-sama mendefinisikan kebijakan publik sebagai sarana mencapai tujuan namun menurut cara pandang berbeda. Ketiga pendapat tersebut kemudian selaras dengan ungkapan Syafiie yang menyimpulkan bahwa kebijakan publik adalah sarana mencapai tujuan melalui cara dan tindakan yang saling berkaitan dan mempengaruhi.

Eyestone mendefinisikan kebijakan publik sebagai hubungan antara unit pemerintah dan lingkungannya. Pressman dan Widavsky mendefinisikan kebijakan publik sebagai kondisi awal dan akibat yang bisa diramalkan. Sementara itu, Easton mendefinisikan kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa. Paparan definisi ditutup dengan pendapat Laswell dan Kaplan yang menarik benang merah dari ketiga definisi kebijakan publik tersebut dengan menyatakan kebijakan publik sebagai program untuk mencapai tujuan dengan nilai terarah.

Dalam hal definisi kebijakan publik yang paling relevan untuk penelitian ini adalah pendapat Inu Kencana Syafiie yang mendefinisikan kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi, dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah (Syafiie, 2006). Sebab kebijakan Sistem Zonasi Sekolah hadir sebagai solusi atas permasalahan tidak meratanya pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, setelah memahami mengenai definisi kebijakan publik maka akan dijelaskan bahwa kebijakan publik memiliki tingkatan yang nantinya

akan menjelaskan bagaimana sebuah kebijakan lahir dan apa saja yang dipertimbangkan sebelum membuat sebuah kebijakan.

2.1.2 Tingkatan Kebijakan Publik

Kebijakan publik memiliki tingkatan, Nugroho menegaskan bahwa secara sederhana rentetan atau tingkatan kebijakan publik di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga, yakni kebijakan publik yang bersifat *makro* atau umum, atau mendasar, kebijakan publik yang bersifat (*meso*) atau menengah yaitu penjabar pelaksanaan kebijakan publik dan yang bersifat *mikro* yaitu kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya (Nugroho, 2006). Terkait dengan hierarki kebijakan secara umum Abidin membedakan kebijakan dalam tiga tingkatan yaitu kebijakan umum, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis (Abidin, 2004).

Younis, membagi kebijakan publik atas tiga tahap yakni: formasi dan desain kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan (Younis, 1990). Sedangkan Gortner, menjelaskan ada lima tahapan dalam proses terjadinya kebijakan, yakni pertama identifikasi masalah, kedua formulasi, ketiga legitimasi, keempat aplikasi dan kelima evaluasi (Gortner, 1984). Starling menjelaskan adanya lima tahap proses terjadinya kebijakan publik yaitu *identification of needs*, formulasi usulan kebijakan, adopsi, pelaksanaan program dan evaluasi (Starling, 1977).

Charles O. Jones menegaskan bahwa kebijakan publik terdiri dari komponen-komponen yaitu *goal, plans, programs, decisions* dan *efec* (Jones, 1996). Kaji, mengemukakan bahwa terdapat beberapa unsur yang terkandung dalam kebijakan publik yaitu kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu, kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah, kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, dan bukan apa yang dimkasud akan dilakukan, kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai sesuatu dalam memecahkan masalah

publik tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu), kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif) (Kadji, 2008).

Meringkas pendapat para ahli di atas, Nugroho merumuskan kebijakan memiliki tingkat; makro, meso dan mikro. Abidin merumuskan kebijakan memiliki tingkat; umum, pelaksanaan dan teknis. Yownis merumuskan kebijakan memiliki tingkat; formasi dan desain, implementasi dan evaluasi. Gortner merumuskan kebijakan memiliki tingkat; identifikasi masalah, formulasi, legitimasi, aplikasi dan evaluasi. Terakhir, Jones merumuskan kebijakan memiliki tingkat; *goal, plans, program, decisions efec.*

Dalam penelitian ini, pendapat Yownis merupakan teori paling relevan sebab penelitian ini fokus terhadap implementasi kebijakan yaitu tahap ke-2 kebijakan yang telah dirumuskan oleh Yownis. Pendapat Yownis ini juga merupakan pendapat paling umum yang sering ditemui dalam hal hierarki proses kebijakan. Selanjutnya, akan dibahas mengenai implementasi kebijakan. Bahasan ini merupakan bahasan paling penting dalam penelitian ini. Implementasi kebijakan sebagai *grand theory* yang nantinya akan menghasilkan turunan teori-teori lain sebagai fokus dari penelitian ini. Implementasi merupakan bagian penting yang harus selalu diperhatikan guna tercapainya sebuah tujuan yang tertuang dalam kebijakan.

2.1.3 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik sebagai salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik, sering bertentangan dengan yang diharapkan (Hedegaard Sørensen dan Paulsson, 2020). Itulah sebabnya dalam implementasi kebijakan publik, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang studi kebijakan publik, menurut Djadja Saefullah dalam

praktanya bahwa studi kebijakan publik tersebut dapat dipahami dari dua perspektif, yakni ;

- a. Pertama, perspektif politik, bahwa kebijakan publik di dalamnya perumusan, implementasi, maupun evaluasinya pada hakekatnya merupakan pertarungan berbagai kepentingan publik di dalam mengalokasikan dan mengelola sumber daya (*resources*) sesuai dengan visi, harapan dan prioritas yang ingin diwujudkan.
- b. Kedua, perspektif administratif, bahwa kebijakan publik merupakan ikhwal berkaitan dengan sistem, prosedur, dan mekanisme, serta kemampuan para pejabat publik (*official officers*) di dalam menterjemahkan dan menerapkan kebijakan publik, sehingga visi dan harapan yang diinginkan dicapai dapat diwujudkan di dalam realitas (Tachjan., 2006).

Tachjan juga mengemukakan bahwa implementasi kebijakan publik, disamping dapat dipahami sebagai salah satu aktivitas dari administrasi publik sebagai institusi (birokrasi) dalam proses kebijakan publik, dapat dipahami pula sebagai salah satu lapangan studi administrasi publik sebagai ilmu (Tachjan., 2006). Dunn, memberikan argumennya tentang implementasi kebijakan sebagai sehubungan sifat praktis yang ada dalam proses implementasi kebijakan, maka hal yang wajar bahwa implementasi ini berkaitan dengan proses politik dan administrasi (Dunn, 2004). Jika dilihat dari konteks implementasi kebijakan, maka hal ini akan berkaitan dengan kekuasaan (*power*), kepentingan dan strategi para pelaku kebijakan, disamping karakteristik lembaga dan rezim serta izin pelaksanaan dan respon terhadap kebijakan.

Apabila sebuah kebijakan diambil secara tepat, maka kemungkinan kegagalan pun masih bisa terjadi, jika proses implementasinya secara tidak baik dan optimal, maka kebijakan tersebut gagal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan para pembuatnya. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa implementasi kebijakan pada substansinya adalah cara yang tepat untuk melaksanakan agar sebuah kebijakan yang baik dapat mencapai

tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para pembuat kebijakan. Nugroho menawarkan dua pilihan langkah, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program, dan melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut (Nugroho, 2003).

Sementara itu Wahab mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang di atasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya (Wahab, 2012). Ini berarti bahwa setelah suatu keputusan diambil, langkah berikutnya adalah bagaimana keputusan itu diimplementasikan. Tanpa implementasi maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia belaka, karena itu implementasi kebijakan sebenarnya adalah pada *action intervention* itu sendiri (Naihasyi, 2006).

Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan mempunyai kedudukan yang penting dalam pengambilan kebijakan. Van Meter Van Horn mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan (Wahab, 2012). Sedangkan Nakamura dan Smallwood mengemukakan bahwa implementasi adalah “(1) *a declaration government preferences*; (2) *mediated by a number of actors who*; dan (3) *create a circular proces characterized by reciproaal power relations and negotiations*. (Nakamura, 1980).

Sementara itu Gunn dan Hoogwood mengemukakan implementasi merupakan sesuatu yang sangat esensial dari suatu teknik atau masalah manajerial (Sunggono, 1994). Sehubungan dengan itu Nugroho mengartikan implementasi sebagai upaya melaksanakan keputusan kebijakan (Nugroho, 2003). Hal ini sejalan dengan pandangan Salusu yang mengartikan implementasi sebagai operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai suatu sasaran tertentu dan menyentuh seluruh jajaran manajemen mulai dari manajemen puncak sampai pada karyawan terbawah (Salusu, 2003).

Berkaitan dengan faktor sumber daya manusia yang mempengaruhi proses implementasi suatu kebijakan, Mazmanian dan Sabatier membuat kategorisasi bahwa implementasi kebijakan dipahami melalui tiga perspektif yang berbeda, yaitu pembuat kebijakan, pejabat pelaksana di lapangan dan aktor individu selaku kelompok target. Kepatuhan pelaksana diukur dengan cara melihat kesesuaian perilaku pelaksana dengan kewajiban yang dilaksanakan (Subarsono, 2005). Bertolak dari uraian di atas, maka implementasi diartikan sebagai upaya melakukan, mencapai, memenuhi, dan menghasilkan (Wibawa dan Samodra, 1994).

Apabila pemahaman ini diarahkan pada lokus dan fokus (perubahan) ketika kebijakan diterapkan akan sejalan dengan pandangan Van Meter Van Horn bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan (Parsons, 2006). Pengorganisasian tujuan-tujuan tersebut melalui peraturan perundang-undangan, merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dengan lingkungannya dalam proses pengambilan keputusan. Dengan kata lain implementasi suatu kebijakan berkaitan erat dengan faktor manusia, dengan berbagai latar belakang aspek sosial, budaya, politik dan sebagainya (Kurniawan dkk, 2020).

Sehubungan dengan itu Anderson menyatakan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan ada empat aspek yang harus diperhatikan yaitu siapa yang dilibatkan dalam implementasi, hakikat proses administrasi, kepatuhan atas suatu kebijakan dan efek atau dampak dari implementasi (Anderson, James, 1997). Pandangan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha untuk mencapai apa yang mengarah pada penempatan suatu program ke dalam tujuan keputusan yang diinginkan. Senada dengan itu, Tangkilisan menjelaskan Ada tiga kegiatan utama yang paling penting dalam implementasi kebijakan, yaitu penafsiran, organisasi dan penerapan (Tangkilisan, S Nogi, 2002).

Abidin mengemukakan bahwa implementasi suatu kebijakan berkaitan dengan dua faktor utama yaitu faktor internal dan faktor eksternal (Abidin, 2004). Selain itu Abidin juga menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dapat dilihat dari empat pendekatan, yaitu pendekatan struktural, pendekatan prosedural, pendekatan kejiwaan, dan pendekatan politik. Sehubungan dengan itu maka, Nugroho dan Naihasyi menjelaskan bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua langkah yang dilakukan, yaitu langsung mengimplementasikan ke dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan *derivat* atau turunan dari kebijakan publik tersebut (Nugroho, 2003) dan (Naihasyi, 2006).

Sehubungan dengan itu, maka ada dua hal penting yang harus diperhatikan berkenaan dengan implementasi kebijakan, yaitu peralatan kebijakan, dan kewenangan yang tersedia untuk melakukan implementasi (Abidin, 2004). Secara sederhana tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah (Wibawa dan Samodra, 1994). Sejalan dengan itu maka Nugroho menjelaskan bahwa manajemen kegiatan implementasi kebijakan dapat disusun secara

berurutan melalui tahapan-tahapan sebagai implementasi strategi, pengorganisasian, penggerakkan dan kepemimpinan, pengendalian (Nugroho, 2003). Secara jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Manajemen Kegiatan Implementasi Kebijakan

No	Tahap	Isu Penting
1.	Implementasi Strategi (Pra Implementasi)	Menyesuaikan struktur dengan strategi
		Melembagakan strategi
		Mongoperasikan strategi
		Desain organisasi dan struktur organisasi
2.	Penggorganisasian	Pembagian pekerjaan dan desain pekerjaan
		Integrasi dan koordinasi
		Perekrutan dan penempatan sumber daya manusia
		Hak, wewenang, dan kewajiban
		Pendelegasian
		Pengembangan kapasitas organisasi dan kapasitas sumber daya manusia
3.	Penggerakan dan Kepemimpinan	Budaya organisasi
		Efektivitas Kepemimpinan
		Motivasi
		Etika
		Mutu
		Kerja sama tim
		Komunikasi Organisasi
4.	Pengendalian	Negosiasi
		Desain pengendalian
		Sistem informasi manajemen
		Pengendalian anggaran/keuangan audit

Sumber: Diolah Peneliti, 2020.

Uraian di atas menunjukkan bahwa inti dari implementasi kebijakan adalah bagaimana kebijakan yang dibuat disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia. Selain itu, penting juga diperhatikan adalah perlunya pedoman yang dapat mengarahkan ruang gerak dari pelaksana untuk memilih tindakan sendiri yang otonom di dalam batas wewenangnya apabila menghadapi situasi khusus. Pedoman ini membantu pelaksana

untuk menyesuaikan diri apabila ada hal-hal yang bersifat khusus yang ditemukan ketika melakukan implementasi keputusan.

Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pada umumnya cenderung mengarah pada pendekatan sentralistis atau dari atas ke bawah. Sehubungan dengan itu, Abidin menjelaskan bahwa tidak semua kebijakan berhasil diimplementasikan secara sempurna, karena menyangkut kondisi riil yang sering berubah dan sukar diprediksikan. Hal ini sejalan dengan Salusu yang menyetir pandangan dari Alexander tentang masalah yang sering dijumpai dalam melaksanakan suatu strategi, yaitu:

- a. Jangka waktu pelaksanaan lebih lama dari yang direncanakan, koordinasi tidak berjalan secara efektif, pelaksana tidak memiliki keterampilan yang memadai, faktor eksternal kurang terkontrol dan sering dilupakan.
- b. Kualitas kepemimpinan yang kurang memadai, sehingga pengarahan, instruksi kepada karyawan sering tidak tepat, pelatihan yang disyaratkan jarang dilakukan, monitoring atas pelaksanaan tugas eselon bawah sangat lemah (Salusu, 2003).

Masalah lain yang sering muncul yaitu implementasi sering mengalami hambatan, yaitu dalam proses perumusan kebijakan biasanya terdapat asumsi, generalisasi dan simplifikasi, yang dalam implementasi tidak mungkin dilakukan, akibatnya adalah adanya kesenjangan antara apa yang dirumuskan dengan apa yang dilaksanakan. Kesenjangan ini menurut Warnham disebabkan oleh tidak tersedia sumber daya pada saat dibutuhkan, kurangnya informasi dan tujuan-tujuan dari unit-unit organisasi sering bertentangan sehingga membutuhkan waktu yang lama bagi manajemen untuk menyesuaikannya (Salusu, 2003). Selain itu kesenjangan tersebut boleh jadi disebabkan karena tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya dan karena mengalami kegagalan dalam proses pelaksanaan (Abidin, 2004).

Meringkas beberapa teori mengenai implementasi kebijakan publik yang ada, peneliti mencoba menarik benang merah dari beberapa ahli mengenai pendapat mereka terhadap definisi implementasi kebijakan publik sebagai berikut;

- a. Dunn mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai proses politik administrasi.
- b. Adiwisatra mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai kemampuan pelaksana merespon dan memahami harapan masyarakat.
- c. Wahab mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai pelaksanaan identifikasi masalah, menyebutkan tujuan dan mengatur implementasi.
- d. Naihasyi mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai kegiatan interaktif dan berkaitan dengan proses sebelum dan sesudahnya.
- e. Horn mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan mencapai tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan.
- f. Nakamura dan Smallwood mendefinisikan implementasi kebijakan publik deklarasi pilihan pemerintah dengan aktor-aktor terlibat melalui kekuatan hubungan dan negosiasi.
- g. Gun dan Hogwood mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai sesuatu yang sangat esensial dari teknik dan masalah manajerial.
- h. Nugroho mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai upaya melaksanakan keputusan kebijakan.
- i. Salusu mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai operasionalisasi aktifitas untuk mencapai tujuan tertentu dan menyentuh seluruh jajaran.
- j. Anderson mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai proses dinamis melibatkan usaha mencapai penempatan program ke keputusan yang digunakan.

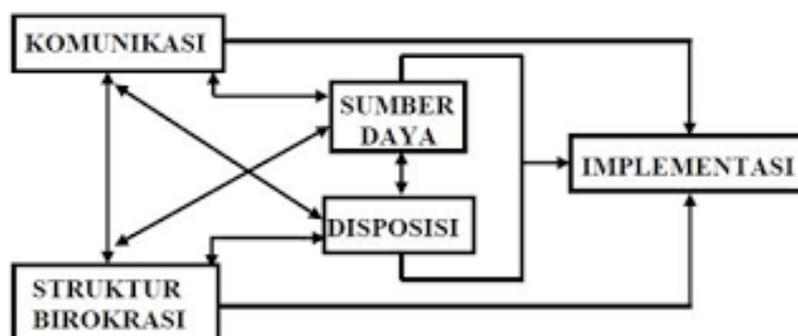
k. Wibawa mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai cara menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah.

Berdasarkan pemaparan teori yang ada, teori Horn adalah teori yang paling tepat, mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan mencapai tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan. Sebagaimana faktanya, tujuan pemerataan pendidikan telah dituliskan di tiap-tiap kebijakan sampai pada lahirnya kebijakan Sistem Zonasi. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai variabel implementasi kebijakan publik. Teori variabel implementasi kebijakan publik dalam penelitian ini digunakan sebagai *middle theory* yang tidak kalah penting dari *grand theory*. *Middle theory* berupa variabel digunakan sebagai kriteria penilaian untuk mendapatkan aktor yang perannya paling dominan dalam kebijakan Sistem Zonasi Sekolah. Setelah membahas mengenai implementasi kebijakan publik kita juga harus memahami variabel apa saja yang ada di dalamnya.

2.1.4 Variabel Implementasi Kebijakan Publik

Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa proses implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan (Wahab, 2012). Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu (Sunggono, 1994). Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan kebijakan, perumusan kebijakan dan implementasi harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik. Evaluasi implementasi Edward menyatakan bahwa ada empat variabel krusial dalam implementasi yaitu komunikasi, sumberdaya, watak atau sikap dan struktur birokrasi (Edward III, 1990.) keempat faktor tersebut beroperasi secara simultan dan saling berinteraksi satu sama lainnya. Interaksi antara faktor-faktor tersebut dapat diilustrasikan seperti tampak pada gambar berikut:



Gambar 1. Implementasi Kebijakan Publik.

Sumber: (Edward III, 1990)

a. Komunikasi

Menurut George Edwards III, komunikasi merupakan penyampaian pesan atau informasi tentang kebijakan antara pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Hal ini menyangkut transfer pengetahuan yang meliputi hakikat kebijakan, cara pelaksanaan, batasan-batasan norma, evaluasi terhadap kebijakan dan lainnya. Edward berpendapat bahwa faktor *clarity* (kejelasan) menjadi penting dalam proses implementasi kebijakan. Tidak adanya pemaknaan yang ambigu.

Intinya, kejelasan tidak identik dengan informasi yang berlebihan, dimana Edwards menyebutnya dengan *overly specific instruction*, yang dapat menghilangkan fleksibilitas dan akan berujung pada kebijakan menjadi kaku. *Consistency* (konsisten) menjadi ukuran lain bagi Edwards dalam proses komunikasi implementasi kebijakan.

b. Sumber Daya

Efektifitas kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan tidak akan berjalan secara efektif dan baik ketika tidak di dukung oleh potensi-potensi sumber daya yang tidak tersedia. Diyakini bahwa sumberdaya-sumberdaya yang potensial akan berdampak langsung pada proses implementasi kebijakan. Termasuk dalam sumberdaya antara lain staf yang relatif jumlahnya yang disertai dengan kemampuan dan keahlian yang memadai untuk keperluan implementasi kebijakan. Sisi lain, informasi yang memadai, kewenangan yang dimiliki implementor, adanya fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana, sarana dan prasarana.

c. Disposisi

Edwards menterjemahkan disposisi sebagai pembawaan, kepribadian, pandangan, ideologi pelaksana kebijakan publik. Harus terjadinya korelasi positif atas sikap, pandangan, kesungguhan antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan. Hal terpenting dari disposisi yaitu staff birokrasi yang menekankan pada penempatan staf yang benar-benar kapabel dan selaras demi menjamin terlaksananya kebijakan. Kedua, yaitu pemberian insentif bagi pelaksana kebijakan sebagai sarana pengendalian bagi pelaksana kebijakan untuk dapat melaksanakan kebijakan sesuai dengan yang direncanakan.

d. Struktur Birokrasi

Birokrasi menurut Edwards, faktor terakhir yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan yaitu struktur birokrasi. Dalam konteks ini Edwards membidik persoalan struktur dalam hal mendasar yaitu

struktur birokrasi harus memiliki standar operasional prosedur yang merupakan pedoman langkah-langkah yang harus disepakati bersama berupa keseragaman pola dalam menjalankan proses implementasi kebijakan. Edwards menjelaskan bahwa fragmentation merupakan pembagian pusat koordinasi dan pertanggungjawaban. Fragmentasi ini akan membawa konsekuensi besar dalam keberhasilan proses implementasi. Dalam konteks ini, Edwards mempertegas, bahwa pembagian pusat koordinasi harus dibagi dalam kondisi yang tepat dan sesuai dengan porsinya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori dari George Edward III karena disesuaikan dengan kondisi permasalahan penelitian, selain itu mengacu pendapat George Edward III yang mengatakan bahwa implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil. Dalam kaitanya dengan penelitian ini adalah penelitian ini ingin mengetahui aktor manakah yang paling dominan sesuai dengan kriteria penilaian yang ada untuk mewujudkan keberhasilan kebijakan Sistem Zonasi Sekolah. Teori George Edward III mengenai empat variabel implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi menjadi kriteria penilaian untuk menentukan aktor dominan sekaligus menjadi *middle theory* dalam penelitian ini.

2.2 Tinjauan Tentang Aktor Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan (termasuk kebijakan pendidikan) merupakan perangkat operasional, atau pedoman-pedoman bagi pemerintah untuk melaksanakan keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh lembaga politik (U. B. Wibowo, 2013). Dalam pembahasan tentang kebijakan publik, Aktor mempunyai posisi yang amat strategis. Interaksi Aktor dan kelembagaan inilah yang kemudian menentukan proses perjalanan dan strategi yang dilakukan oleh komunitas kebijakan dalam makna yang lebih luas (Pritasari, 2019). Pada prinsipnya aktor kebijakan

adalah mereka yang selalu dan harus terlibat dalam setiap proses analisis kebijakan publik, yang senantiasa aktif dan proaktif di dalam melakukan interaksi dan interelasi di dalam konteks analisis kebijakan publik (Madani, 2011).

Demikian dapat dipahami bahwa makna aktor dalam kaitannya dengan kebijakan publik selalu terkait dengan pelaku dan penentu terhadap suatu kebijakan yang berinteraksi dan melakukan interelasi di dalam setiap tahapan proses kebijakan publik (Fauzi dan Dewi Rostyaningsih, 2018). Dalam perspektif lain, sebagaimana ditegaskan oleh Anderson bahwa model atau tipe pengambilan kebijakan dikaitkan dengan proses pembahasannya dalam agenda kebijakan publik dapat dibedakan dalam tiga bentuknya, yaitu pola kerjasama (*bargaining*), persuasif (*persuasion*), dan pengarah (*commanding*) (Madani, 2011).

2.2.1. Tipe Aktor Dalam Proses Kebijakan

Kajian terhadap aktor perumus dan pelaksana kebijakan merupakan hal yang penting. Para aktor merupakan penentu isi kebijakan dan pemberi warna dinamika tahapan-tahapan proses kebijakan (Lester, 2000).

2.2.1.1 Empat Golongan Aktor Menurut (Jones, 1996)

a. Golongan Rasionalis

Ciri-ciri utama dari kebanyakan golongan aktor rasionalis ialah bahwa dalam melakukan pilhan alternatif kebijaksanaan mereka selalu menempuh metode dan langkah-langkah mengidentifikasi masalah, merumuskan tujuan dan menyusunnya dalam jenjang tertentu, mengidentifikasi semua alternatif kebijaksanaan, meramalkan atau memprediksi akibat-akibat dari tiap alternatif, membandingkan akibat-akibat tersebut dengan selalu mengacu pada tujuan, memilih alternatif terbaik (Meutia, 2017).

b. Golongan Teknis

Seorang teknisi pada dasarnya tidak lebih dari rasionalis, sebab ia adalah seorang yang karena bidang keahliannya atau spesialisasinya dilibatkan dalam beberapa tahapan proses kebijaksanaan. Golongan teknisi dalam melaksanakan tugasnya boleh jadi memiliki kebebasan namun kebebasan ini sebatas pada lingkup pekerjaan dan keahliannya. Biasanya mereka bekerja di proyek-proyek yang membutuhkan keahliannya, namun apa yang harus mereka kerjakan biasanya ditetapkan oleh pihak lain (Meutia, 2017).

c. Golongan Inkrementalis

Golongan aktor inkrementalis ini dapat kita identikkan dengan para politisi. Golongan inkrementalis memandang tahap-tahap perkembangan kebijaksanaan dan implementasinya sebagai suatu rangkaian proses penyesuaian yang terus menerus terhadap hasil akhir (yang berjangka dekat maupun yang berjangka panjang) dari suatu tindakan. Bagi golongan inkrementalis, informasi dan pengetahuan yang kita miliki tidak akan pernah mencukupi untuk menghasilkan suatu program kebijaksanaan yang lengkap. Gaya kerja golongan inkrementalis ini dapat dikategorikan sebagai seorang yang mampu melakukan tawar-menawar atau *bargaining* (Meutia, 2017).

d. Golongan Reformis (Pembaharu)

Golongan reformis memiliki tekanan perhatiannya adalah pada tindakan sekarang, karena urgensi dari persoalan yang dihadapi. Pendekatan semacam itu umumnya ditempuh oleh para *lobbyist*. Nilai-nilai yang mereka junjung tinggi ialah yang berkaitan dengan upaya untuk melakukan perubahan sosial, kadang kala demi perubahan sosial itu sendiri namun lebih sering bersangkutan dengan kepentingan-kepentingan

kelompok tertentu. Tujuan kebijaksanaan biasanya ditetapkan dalam lingkungan kelompok-kelompok tersebut, melalui berbagai macam proses termasuk diantaranya atas dasar keyakinan pribadi bahwa hasil akhir dari tindakan pemerintah sekarang telah melenceng atau bahkan gagal (Meutia, 2017).

2.2.1.2 Empat Golongan Aktor Menurut (Thompson, 1990):

- a. Aktor dengan tingkat kepentingan (*interest*) dan kekuatan (*power*) yang tinggi diklasifikasikan sebagai Pemain Kunci (*KeyPlayers*). Aktor ini harus lebih aktif dilibatkan secara penuh termasuk dalam mengevaluasi strategi baru.
- b. Aktor dengan tingkat kepentingan (*interest*) yang rendah tetapi memiliki kekuatan (*power*) yang tinggi diklasifikasikan sebagai pendukung (*contestsetters*). Aktor ini dapat mendatangkan resiko sehingga keberadaannya perlu dipantau dan dikelola dengan baik. Aktor ini dapat berubah menjadi *keyplayers* karena suatu peristiwa. Hubungan baik dengan stakeholder ini terus dibina. Untuk itu segala informasi yang dibutuhkan harus tetap diberikan sehingga mereka dapat terus berperan aktif dalam pencapaian tujuan (Thompson, 1967).
- c. Aktor dengan tingkat kepentingan (*interest*) yang tinggi tetapi memiliki kekuatan (*power*) yang rendah diklasifikasikan sebagai Subyek (*Subjects*). Aktor ini memiliki kapasitas yang rendah dalam pencapaian tujuan, akan tetapi dapat menjadi berpengaruh dengan membentuk aliansi dengan aktor lainnya. Aktor ini sering bisa sangat membantu sehingga hubungan dengan aktor ini harus tetap dijaga dengan baik.
- d. Aktor dengan tingkat kepentingan (*interest*) dan kekuatan (*power*) yang rendah diklasifikasikan pengikut lain, untuk melibatkan aktor ini lebih jauh karena kepentingan dan

pengaruh yang dimiliki biasanya berubah seiring berjalannya waktu. Aktor ini harus tetap dimonitor dan dijalin komunikasi dengan baik.

Dalam proses kebijakan terdapat aktor-aktor yang berperan didalamnya. Setiap peran yang diemban oleh aktor-aktor ini tentunya memiliki tanggung jawab terhadap hasil yang telah dilakukan oleh aktor-aktor tersebut. Aktor dalam hal ini dibagi menjadi 2 yaitu *Official Actor* dan *Unofficial Actor*. Dari kedua bentuk aktor tersebut tentunya memiliki peran yang berbeda, *official actor* merupakan aktor yang terdiri dari lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif sebagai lembaga sah yang memiliki kewenangan dalam kebijakan publik. Sedangkan *Unofficial Actor* terdiri dari orang-orang yang berada diluar lingkup pemerintahan (Agustino, 2012).

Teori Thompson merupakan teori yang ideal untuk membantu mengklasifikasikan aktor dalam kebijakan Sistem Zonasi Sekolah. Thompson membagi 4 kelompok aktor dengan melihat masing-masing kekuatan dan kepentingan aktor. Perbedaan kekuatan dan kepentingan aktor juga akan berimbas terhadap peran yang akan dijalakan oleh masing-masing aktor dalam kebijakan ini. Teori Thompson peneliti gunakan sebagai *application theory* dalam penelitian ini sebab kriteria mengenai kekuatan dan kepentingan masing-masing aktor peneliti jadikan variabel yang membantu mengklasifikasikan masing-masing aktor ke dalam golongan yang sudah tersedia.

2.2.2 Karakteristik Interaksi Aktor Pelaksana Kebijakan

Interaksi yang terjadi umumnya berbentuk kerjasama (*cooperation*) dan bahkan pertikaian atau pertentangan (*competition*). Gillin dalam Soekanto menyatakan penggolongan proses sosial yang timbul sebagai akibat adanya interaksi sosial. Proses interaksi asosiatif terbagi dalam bentuk-bentuk kerjasama (*corporation*), akomodasi (*accomodation*) yang terbagi dalam; *coercion*, *compromise*, *arbitration*, *mediation*,

conciliation, toleration, stalemate, adjudication dan asimiliasi (*assimilation*). Sedangkan proses interaksi *disosiatif* terbagi dalam bentuk-bentuk persaingan (*competition*), kontravensi (*contravension*), pertentangan dan pertikaian (*conflict*) (Rijal dkk, 2013).

Interaksi dalam proses asosiatif diwujudkan dalam bentuk kerjasama maupun persetujuan. Menurut para Sosiolog, bentuk interaksi paling utama adalah kerjasama diantara orang perorangan atau antar kelompok sebagai suatu usaha bersama untuk mencapai tujuan bersama (Madani, 2011). Bentuk interaksi lainnya yang termasuk dalam proses asosiatif adalah akomodasi (*accomodation*). Bentuk ini pada dasarnya adalah upaya dalam mengatasi pertentangan atau konflik yang terjadi antara organisasi yang satu dengan yang lainnya tanpa menimbulkan kekalahan atau kerugian organisasi yang terlibat didalamnya (Madani, 2011).

Bentuk interaksi menurut Gillin merupakan bentuk interaksi paling tepat yang cocok dipadukan dengan penelitian mengenai interaksi jenis apapun termasuk dalam penelitian ini. Ada banyak aktor terlibat dalam kebijakan Sistem Zonasi Sekolah dimulai dari formulasi, implementasi hingga evaluasi. Banyaknya aktor ini hanya menimbulkan dua kemungkinan bentuk interaksi yaitu asosiatif dan disosiatif. Kunci keberhasilan kebijakan salah satunya adalah dengan adanya interaksi yang sifatnya asosiatif.

2.2.3 Tipologi Interaksi Aktor Kebijakan

Menurut Stone terdapat 4 (empat) tipe interaksi dalam penggunaan kekuasaan antar institusi yaitu:

2.2.3.1 *Decisional*

Interaksi terbentuk karena penggunaan kekuasaan atau wewenang yang dimiliki oleh masing-masing kelompok yang terlibat untuk memperjuangkan kepentingannya atau dalam konteks kebijakan adalah untuk menetapkan pilihan pilihan akhir

kebijakan. Interaksi ini juga dapat terjadi karena adanya kelompok kepentingan seperti bisnis yang secara langsung memberikan dukungan kepada pihak atau kelompok tertentu seperti pada saat pemilihan umum atau kampanye.

2.2.3.2 *Anticipated Reaction*

Interaksi yang bersifat langsung namun yang terbentuk karena struktur kekuasaan dan penguasaan atas sumber daya pada situasi tertentu.

2.2.3.3 *Nondecision Making*

Interaksi yang diidentifikasi adanya kelompok yang kuat atau mayoritas berupaya mempengaruhi kebijakan. Interaksi tipe ini juga dapat melibatkan pihak ke tiga atau eksternal untuk mendukung salah satu aktor kebijakan. Pengaruh eksternal ini menjadi bagian dari kekuasaan dan kepentingan elit.

2.2.3.4 *Systemic*

Interaksi yang secara tidak langsung dipengaruhi oleh system seperti sistem politik, ekonomi, sosial. Hal ini diidentifikasi melalui perilaku elit/ pejabat yang berpihak kepada kelompok kepentingan tertentu. Dalam tipe interaksi ini penggunaan kekuasaan dilakukan oleh tiga kelompok atau aktor yang menempatkan pejabat public pada posisi tengah. Interaksi tidak langsung ditandai terjadinya interaksi antara kelompok kepentingan yang berusaha untuk mempengaruhi elit kebijakan dengan tujuan agar kepentingannya dapat menjadi pilihan kebijakan, namun di satu sisi, penggunaan dukungan kelompok kepentingan dinilai strategis oleh elit kebijakan untuk memperkuat prioritas pilihan kebijakannya (Madani, 2011).

2.3 Tinjauan tentang Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah

Kebijakan pelaksanaan sistem Zonasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) masih relatif baru. Banyak permasalahan yang muncul di masyarakat dan para orang tua terkait dengan sistem baru dalam seleksi penerimaan peserta didik ini. Para orang tua dan masyarakat sepertinya masih ragu akan efektivitas dan efisiensi dari program Sistem Zonasi PPDB ini. Dalam rangka memberikan pemahaman yang utuh terhadap pelaksanaan sistem zonasi PPDB dan implikasinya pada peningkatan mutu pendidikan. Semula, uraian sistem zonasi ini diorientasikan pada panduan pelaksanaan Sistem Zonasi PPDB, namun dalam perkembangannya perlu dikembangkan pada Sistem Zonasi Mutu Pendidikan sebagai pasangan kebijakannya.

2.3.1 Pengertian Sistem Zonasi

Istilah “zonasi” mulai digunakan pada tahun 2017 dalam penataan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat. Pengertian “zonasi” dimaknai sebagai pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Dengan sistem zonasi semua – khususnya sekolah negeri – disiapkan untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu secara merata bagi warga anggota masyarakat pada suatu areal atau kawasan tertentu sehingga “anak-anak terbaik” tidak perlu mencari “sekolah terbaik” yang lokasinya jauh dari tempat tinggalnya. Sistem Zonasi PPDB ini ternyata memberi implikasi pada perlunya penyiapan sekolah yang sama dan setara mutunya dengan sekolah yang selama ini dianggap sekolah unggul atau sekolah favorit (Kemendikbud, 2019b).

Sistem zonasi PPDB mengatur sekolah negeri milik pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Radius zona terdekat ditetapkan pemerintah daerah sesuai dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut dan daya tampung rombongan belajar pada setiap sekolah. Namun demikian, sekolah dapat menerima peserta didik baru di luar zona terdekat karena alasan prestasi paling banyak 5% dan paling banyak 5% karena alasan khusus, misalnya perpindahan domisili orang tua/wali (Kemendikbud, 2019b).

Sistem zonasi pada PPDB ini dapat berlangsung secara lebih objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, merata, dan berkeadilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Penerapan sistem zonasi pada PPDB akan berimplikasi pada pudarnya status “sekolah unggulan” atau “sekolah favorit” yang menyebabkan adanya “kasta” dalam sistem persekolahan di Indonesia. Hal ini memberi konsekuensi bahwa pemerintah harus menyiapkan sistem pengelolaan dan penyelenggaraan layanan pembelajaran yang merata mutunya berdasarkan standar mutu yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP) (Kemendikbud, 2019b).

2.3.2 Pentingnya Sistem Zonasi

Pelayanan pendidikan yang merata dan berkeadilan bagi setiap warga negara merupakan suatu keharusan atau kewajiban pemerintah yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Pelayanan pendidikan secara praksis saat terkesan memberikan perlakuan yang berbeda di mana terdapat sekolah tertentu yang disebut dengan sekolah unggul atau sekolah favorit. Sekolah tersebut dianggap mampu memberikan layanan yang terbaik yang menjamin masa depan peserta didiknya untuk memilih dan melanjutkan ke jenjang pendidikan terbaik berikutnya, bahkan dapat menentukan masa depan karier hidup mereka (Kemendikbud, 2019b)

Akibatnya, ada warga tertentu yang tidak bisa mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas karena faktor geografis, kendala transportasi, akomodasi, dan lainnya karena keberadaan sekolah unggulan yang umumnya berada di kota-kota besar. Selain itu, dengan adanya sekolah unggulan atau favorit orientasi perlakuan khusus mengakibatkan semua sumber daya diberikan kepada sekolah tersebut. Di sekolah favorit disediakan bangunan yang baik dan nyaman, guru-guru terpilih dan terbaik, penyediaan berbagai sumberdaya di sekolah disiapkan dan disediakan sepenuhnya oleh pemerintah sehingga sekolah lain kurang mendapatkan perhatian (Kemendikbud, 2019b).

Kurangnya perhatian terhadap sekolah reguler terus berlangsung sehingga mengakibatkan sekolah tersebut tidak berkembang, sementara sekolah unggulan yang dijadikan pusat perhatian dan terus diberi bantuan dan dukungan yang berlebihan. Akibatnya, penyebaran mutu sekolah juga tidak bisa dilakukan oleh pemerintah yang diperparah oleh persepsi orang tua dan masyarakat terhadap “*labeling*” sekolah yang mempertahankan “*status quo*” yang mengakibatkan mutu layanan pendidikan tidak bisa merata dan adil untuk melayani anak di setiap wilayah pelosok tanah air (Kemendikbud, 2019b).

2.3.3 Tujuan Sistem Zonasi

Menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan; Menjamin ketersediaan dan kesiapan satuan pendidikan (sekolah negeri, khususnya) untuk dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Menjamin adanya pemerataan akses dan mutu pendidikan yang berkeadilan pada setiap zona/wilayah yang ditetapkan mendekati tempat tinggal peserta didik. Memastikan terpenuhinya tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai yang dapat digunakan oleh setiap satuan pendidikan yang ada di wilayah/zona yang telah ditetapkan (Kemendikbud, 2019b).

2.3.4 Regulasi Sistem Zonasi

Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 31 yang menyatakan pada Ayat (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dan pada Ayat (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Upaya memenuhi tugas dan fungsi dalam melayani hak warga untuk mendapat pendidikan perlu didukung oleh peraturan terkait sebagai turunan dari UUD 1945 tersebut (Kemendikbud,2018).

Terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat menjadi dasar pengembangan sistem zonasi pada isu pendidikan lainnya (Kemendikbud,2020). Sementara itu di Provinsi Lampung, kebijakan Sistem Zonasi Sekolah tertuang dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas di Provinsi Lampung.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memandang peran aktor kebijakan dengan perspektif yang berbeda. Jika pada umumnya peran aktor kebijakan dikaitkan dengan formulasi kebijakan, penelitian ini berfokus pada peran aktor kebijakan dalam implementasi kebijakan yang nantinya akan dilihat aktor yang memiliki peran paling penting berdasarkan variabel dalam implementasi sebuah kebijakan. Berikut adalah penelitian terdahulu sejenis yang juga penulis jadikan sebagai beberapa landasan rujukan dalam penelitian ini:

Tabel 4. Penelitian Terdahulu

No	Identitas Karya Ilmiah				Isi Karya Ilmiah		
	Peneliti	Universitas	Tahun	Jenis	Teori	Metode	Hasil
1	ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KURIKULUM SENI BUDAYA KETERAMPILAN DI SEKOLAH DASAR NASIONAL 1, BEKASI, JAWA BARAT						
	(Maliki)	UI	2012	Tesis	George Edward III mengungkapkan ada 4 (empat) faktor penting dalam implementasi kebijakan.	Kualitatif yang bersifat deskriptif.	Proses komunikasi, koordinasi, komitmen, tanggungjawab yang dilakukan secara terstruktur dan tersebar secara akurat, jelas dan konsisten akan mereduksi berbagai kendala yang mungkin terjadi.
2	ANALISIS AKTOR IMPLEMENTASI DALAM KEBIJAKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SEMARANG (Studi Kasus di Kecamatan Gunungpati)						
	(R. F. Wibowo & Rostyani ngsih)	UNDIP	2016	Jurnal	Thompson mengungkapkan bahwa peran aktor dalam pelaksanaan suatu kebijakan dikategorikan menjadi 4 jenis.	Kualitatif yang bersifat deskriptif.	<i>Key Players:</i> Bappeda dan Dinas Tata Kota Perumahan,. <i>Contest Setter:</i> Konsultan Jasa. <i>Subjects:</i> Satpol PP. Pengikut Lain: masyarakat, Kelurahan dan Kecamatan.
3	KERJA SAMA PEMERINTAH SWASTA (KPS) SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN BANDAR UDARA RADIN INTEN II LAMPUNG SELATAN						
	(Fauzela)	UNILA	2019	Tesis	Siregar mengungkapkan (KPS) memiliki bentuk Built-Operate-Transfer (BOT), Built-Transfer-Operate (BTO) dan Built-Transfer (BT).	Kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan <i>Anaytical Hierarchy Process</i> (AHP)	Urutan prioritas: Built Transfer (BT), Built Operate Transfer (BOT) dan Built Transfer Operate (BTO).

Sumber: diolah peneliti, 2021

Penelitian pertama berusaha memecahkan persoalan implementasi kurikulum seni budaya dan keterampilan menggunakan teori George Edward III yang mengungkapkan ada empat faktor penting dalam implementasi kebijakan publik, yaitu: komunikasi, sumber daya, karakter atau sikap, dan struktur birokratik. Sementara penelitian ini juga menggunakan teori Edward III sebagai *middle theory*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian milik Maliki adalah dalam penelitian ini menggunakan teori Edward III mengenai variabel implementasi kebijakan dan selanjutnya akan dikaitkan dengan teori Thompson tentang klasifikasi aktor implementasi kebijakan sebab aktor-aktor tersebutlah yang nantinya akan menggunakan variabel implementasi kebijakan sesuai dengan teori Edward III, sementara dalam penelitian milik Maliki teori Edward III digunakan sebagai satu-satunya teori untuk mengidentifikasi berjalannya implementasi kebijakan menggunakan empat buah variabel implementasi berdasarkan teori Edward III.

Penelitian kedua berusaha memecahkan persoalan implementasi kebijakan rencana tata ruang wilayah kota menggunakan teori Thompson yang mengemukakan bahwa peran aktor dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau program dipengaruhi oleh kekuatan (*power*) dan kepentingan (*interest*) yang dimiliki oleh aktor tersebut, sehingga dapat dikategorikan menjadi 4 jenis. Sementara penelitian ini juga menggunakan teori Thompson sebagai *application theory*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian milik Wibowo dan Rostyaningsih adalah dalam penelitian ini teori Thompson digunakan sebelum adanya proposal penelitian yaitu untuk menentukan klasifikasi aktor-aktornya terlebih dahulu sesuai dengan kekuatan dan kepentingannya masing-masing dan kemudian akan dipadukan dengan teori dan metode lainnya untuk menghasilkan jawaban dari penelitian ini, sementara dalam penelitian milik Wibowo dan Rostyaningsih teori Thompson dijadikan sebagai satu-satunya teori inti untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian tersebut.

Penelitian ketiga berusaha mencari bentuk ideal dari sebuah operasionalisasi kerjasama menggunakan pendekatan *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Sementara penelitian ini juga menggunakan pendekatan *Analytical Hierarchy*

Process (AHP). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian milik Fauzela adalah penelitian ini menggunakan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yang dikaitkan dengan subjek yaitu cara menentukan peran aktor paling dominan dalam menjalankan variabel implementasi kebijakan terkait kebijakan PPDB Zonasi agar dapat mencapai keberhasilan kebijakan tersebut bagi semua pihak dan tercapainya tujuan yang ada sebagai alasan kebijakan tersebut lahir. Sementara dalam penelitian milik Fauzela, *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dikaitkan dengan objek yaitu untuk menentukan bentuk kerjasama ideal antara pemerintah dan swasta.

2.5 Kerangka Pikir Penelitian

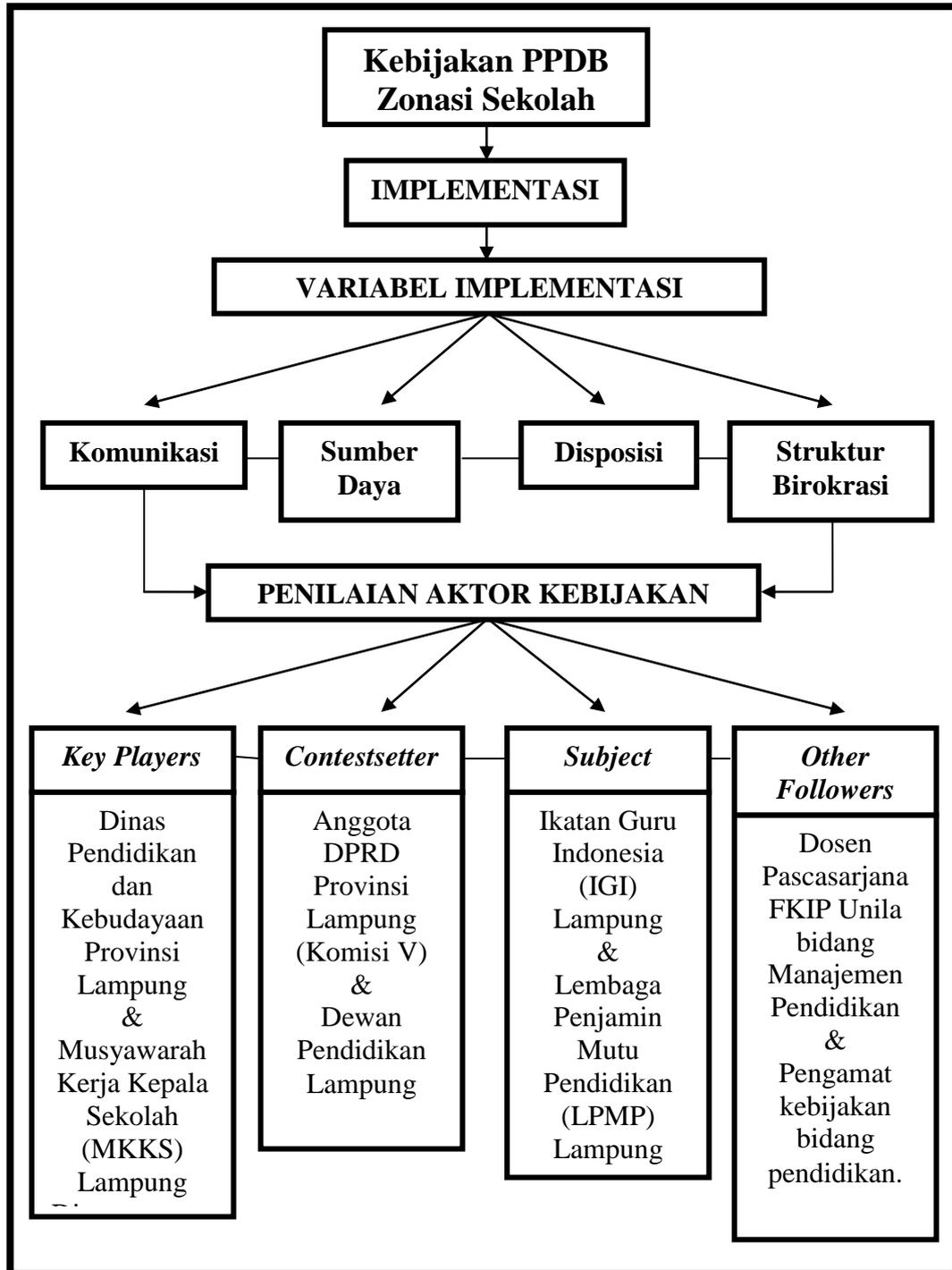
Kebijakan PPDB berbasis zonasi merupakan salah satu kebijakan yang tepat untuk pemerataan akses dan mutu pendidikan karena prinsipnya adalah mendekatkan layanan pendidikan ke masyarakat dan pemeratakan mutu pendidikan. Dalam rangka mensukseskan kebijakan PPDB Zonasi, implementasi kebijakan merupakan hal penting yang harus dijadikan perhatian agar tidak ada kesalahan fatal yang menyebabkan kegagalan kebijakan ini. Dalam sebuah implementasi kebijakan, peran aktor menjadi hal paling krusial sebab para aktor adalah subjek yang akan menjalankan prosedur implementasi.

Dalam penelitian ini implementasi kebijakan akan dibahas berdasarkan teori Van Meter Van Horn (1975) sebagai *grand theory* Selanjutnya, melengkapi teori Horn mengenai implementasi kebijakan publik peneliti menggunakan teori George Edward III (1990) yang menjelaskan empat variabel implementasi kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Variabel ini akan menjadi standar penilaian tentang bagaimana implementasi kebijakan dijalankan oleh seorang aktor. Teori George Edward III menjadi *middle theory* dalam penelitian ini.

Sebagai penutup dari kerangka pikir, *application theory* dalam penelitian ini menggunakan teori (Thompson, 1967). Setelah berbicara mengenai kriteria penilaian di *middle theory*, pembahasan menurun ke arah aktor implementasi

kebijakan publik. Thompson dalam teorinya membagi aktor kebijakan publik ke dalam empat golongan yang kemudian peneliti isi golongan-golongan tersebut sesuai dengan kriteria responden dan peneliti ringkas sebagai berikut;

- a. Aktor dengan kekuatan tinggi dan kepentingan tinggi (*key players*) yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Lampung.
- b. Aktor dengan kekuatan tinggi dan kepentingan rendah (*contestsetters*) yaitu anggota DPRD Provinsi Lampung (Komisi V) dan Dewan Pendidikan Lampung.
- c. Aktor dengan kekuatan rendah dan kepentingan tinggi (*subject*) yaitu Ikatan Guru Indonesia (IGI) Lampung dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Lampung.
- d. Aktor dengan kekuatan rendah dan kepentingan rendah (*other followers*) yaitu Mantan Dekan FKIP Unila sekaligus Dosen Pascasarjana FKIP Unila bidang Manajemen Pendidikan dan pengamat kebijakan bidang pendidikan.



Gambar 2 Kerangka Pikir Penelitian.

Sumber: diolah peneliti, 2021

2.6 Hipotesis

Penelitian ini berfokus pada peran aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan Sistem Zonasi Sekolah. Pengolahan data menggunakan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yang mana akan terdapat fokus, kriteria dan alternatif. Tiap alternatif akan diuji dengan cara disandingkan dengan masing-masing kriteria menggunakan perhitungan dan rumus khusus *Analytical Hierarchy Process* (AHP) kemudian akan menghasilkan jawaban hierarki kepentingan peran masing-masing aktor dalam implementasi kebijakan Sistem Zonasi Sekolah.

Validasi atau kebenaran hasil perhitungan menggunakan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dapat dilihat pada bagian *Eigen Vector* dari keseluruhan elemen yang diuji berjumlah 1,00 dan *Consistency Ratio* (CR) yang nilainya $\leq 0,10$. Apabila hasil *Eigen Vector* dari keseluruhan elemen yang diuji berjumlah 1,00 berarti tidak ada perhitungan yang salah dan apabila *Consistency Ratio* (CR) $\leq 0,10$ berarti data bersifat konsisten dan perhitungan dapat dilanjutkan sampai menemukan hasil akhir berupa hierarki elemen yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini hasil akhir yang diharapkan berupa hierarki kepentingan peran aktor implementasi kebijakan Sistem Zonasi Sekolah.

Dugaan awal, peran paling penting aktor sesuai dengan variabel implementasi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi tertuju pada *key players* yang terdiri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Lampung karena keduanya tergolong ke dalam kelompok aktor yang memiliki kekuatan dan kepentingan yang tinggi. Peringkat selanjutnya yaitu *contestsetter* yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung dan Dewan Pendidikan Lampung dimana kedua aktor ini termasuk ke dalam kategori aktor dengan kekuatan tinggi dan kepentingan rendah.

Ikatan Guru Indonesia (IGI) Lampung dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Lampung yang tergolong dalam kategori *subject* menduduki posisi selanjutnya karena kedua aktor ini memiliki kekuatan

rendah dan kepentingan tinggi. Dosen Pascasarjana Manajemen Pendidikan dan Pengamat Kebijakan Pendidikan yang tergolong dalam kategori *other followers* berada di hierarki paling bawah sebab kedua aktor ini termasuk aktor dalam kategori kekuatan rendah dan kepentingan rendah.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan (ilmiah) yang ditempuh melalui serangkaian proses panjang (Bungin, 2011). Penelitian mengenai peran aktor dalam implementasi kebijakan menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Istilah penelitian kualitatif pada mulanya bersumber dari pengamatan kualitatif yang dipertentangkan dengan pengamatan kuantitatif (Kirk, 1986). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pertimbangan bahwa dalam metode ini memiliki dasar-dasar filosofis yaitu fenomenologis artinya kebenaran dapat diperoleh dengan cara menangkap fenomena yang memancar dari objek yang diteliti dan interaksi simbolik sebagai dasar kajian sosial dan digunakan dalam penelitian kualitatif (Fuad, 2014).

Penelitian kualitatif juga didefinisikan sebagai jenis penilaian yang bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci (Sugiarto, 2015). Argumen peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu: penentuan peran aktor kebijakan dan interaksinya terlebih dahulu ditentukan melalui proses wawancara yang hasilnya menjadi data yang kemudian kelengkapan data untuk diolah lebih lanjut prosesnya menggunakan metode kuesioner. Data dari kuesioner selanjutnya diolah menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dan hasil dari pengolahan tersebut dianalisis kembali serta dibuktikan kebenarannya dengan keadaan di lapangan.

3.2 Fokus dan Lokus Penelitian

Fokus penelitian adalah objek atau apa yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian yaitu variabel implementasi kebijakan Sistem Zonasi Sekolah dan lokus penelitian adalah subjek yaitu para aktor yang terlibat dalam kebijakan Sistem Zonasi Sekolah yang dalam penelitian ini para aktor tersebut juga berperan sebagai informan penelitian.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Secara umum data penelitian dibagi kepada 2 (dua) jenis, yakni:

3.3.1 Data Primer

Dalam penelitian ini, data primer didapatkan melalui wawancara dan kuesioner. Argumen peneliti memilih wawancara sebagai sumber data primer adalah melalui wawancara data yang didapatkan akan sangat detail sesuai dengan kebutuhan penelitian. Argumen peneliti memilih kuesioner juga sebagai sumber data primer sebab penelitian diawali dengan melakukan penilaian dengan besaran angka tertentu terhadap variabel implementasi dan aktor implementasi dalam Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah, data awal untuk menjawab rumusan masalah tersebut selanjutnya diolah dengan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP).

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang melengkapi informasi yang didapat dari sumber data primer, data sekunder dalam penelitian ini berupa observasi. Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan melalui observasi yang dilakukan terhadap bagaimana tiap aktor berperan dalam implementasi kebijakan Sistem Zonasi Sekolah. Hasil perhitungan dari metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) selanjutnya dibuktikan dengan fenomena dan kenyataan yang terjadi di lapangan yang informasinya didapatkan melalui observasi.

3.4 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini berjumlah delapan orang. Penentuan informan secara sengaja dengan memilih informan berdasarkan kategori *expert power* yaitu informan dengan kecakapan dan keahlian tinggi dalam bidang yang dikaji sebab data dari informan nantinya akan diolah melalui metode *Analytical Hierarchy Process (AHP)*. Metode *Analytical Hierarchy Process (AHP)* membutuhkan informan yang benar-benar mengerti akan bidang yang dikaji, sebab jawaban informan akan diperhitungkan dan sangat mempengaruhi hasil akhir dari perhitungan. Menentukan informan dengan kategori *expert power* dilihat dari pembagian aktor kebijakan dalam dua kelompok menurut (Agustino, 2012) yaitu *official actors* dan *unofficial actors*, termasuk dalam *expert power* adalah *official actors*.

Dalam kebijakan Sistem Zonasi Sekolah, Dinas Pendidikan, MKKS SMA Lampung, DPRD Provinsi Lampung, Dewan Pendidikan Lampung, IGI Lampung, LPMP Lampung, Dosen Manajemen Pendidikan dan pengamat kebijakan pendidikan merupakan *official actors* sebab seluruh aktor tersebut berperan dalam implementasi kebijakan Sistem Zonasi Sekolah, oleh sebab itu aktor-aktor tersebut menjadi informan dalam penelitian ini. Sementara *unofficial actors* dalam Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah yaitu; Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), *Ombudsman*, Pers, Partai Politik, Aliansi Mahasiswa, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kelurahan dan orang tua siswa.

Informan kemudian dikelompokkan berdasarkan tingkat kekuatan dan kepentingan masing-masing dalam implementasi kebijakan Sistem Zonasi Sekolah sesuai dengan teori (Thompson, 1990), sehingga dari delapan informan akan ada empat kelompok informan yaitu *key players*, *contestsetter*, *subject* dan *other followers*, informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 5. Informan Penelitian

Klasifikasi Aktor		Aktor	Argumen	
Kekuatan	Kepentingan			
<i>Key Players</i>				
Tinggi	Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung & Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Lampung	<p>Kekuatan: keberadaannya diakui dan dinilai sangat penting sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di tingkat daerah, perannya aktif dan sangat dibutuhkan, ide dan perintahnya sangat berpengaruh dalam jalannya implementasi kebijakan.</p> <p>Kepentingan: memiliki kepentingan merealisasikan apa yang diperintahkan oleh pemerintah pusat dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan suatu kebijakan yang diperintahkan oleh pemerintah pusat dan direalisasikan di daerah.</p>	<p>Partisipasi: sebagai <i>Leader Sector</i> atau coordinator.</p> <p>Perspektif: meminimalisir kesalahan dalam setiap pelaksanaan.</p> <p>Aksesibilitas: mudah, dengan memberikan aturan yang mudah diakses seluruh elemen terkait.</p> <p>Tindakan: secara matang dan berkoordinasi (rasional instrumental)</p>
<i>Contest Setter</i>				
Tinggi	Rendah	DPRD Provinsi Lampung & Dewan Pendidikan Lampung	<p>Kekuatan: sebagai pembantu utama pemain kunci, memiliki kekuatan mengatur dan merealisasikan ide dan menganalisis permasalahan dan solusi juga mengawasi implementasi suatu kebijakan.</p> <p>Kepentingan: kepentingannya rendah sebab tanggung jawab keberhasilan kebijakan ini bukan sepenuhnya berada pada aktor ini, namun aktor ini dipercaya masyarakat untuk terlibat dan membantu keberhasilan sebuah kebijakan demi kesejahteraan bersama.</p>	<p>Partisipasi: sebagai pelaksana teknis rekan pemain kunci..</p> <p>Perspektif: kemampuan memahami kebijakan berbeda-beda.</p> <p>Aksesibilitas: mudah, informasi milik publik dan melalui sosialisasi.</p> <p>Tindakan: mencari akar permasalahan dan penyelesaian.</p>

Tabel 5 (lanjutan)

<i>Subject</i>			
Rendah	Tinggi	Ikatan Guru Indonesia (IGI) Lampung & Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Lampung	<p>Kekuatan: tidak begitu dominan sebab tidak memiliki hak dan kebebasan dalam menyalurkan ide ataupun berkomentar terkait bagaimana implementasi sebuah kebijakan berjalan.</p> <p>Kepentingan: sangat tinggi, sebab kualitas hasil dari kebijakan yang sedang diimplementasikan menjadi tanggung jawab aktor ini. Aktor ini memiliki kepentingan mewujudkan pendidikan yang baik dan berkualitas melalui kebijakan yang sebelumnya telah disediakan oleh pemerintah pusat. Aktor ini bebas dalam melakukan pengawasan.</p>
<i>Other followers</i>			
Rendah	Rendah	Dosen Pascasarjana FKIP Unila bidang Manajemen Pendidikan & Pengamat Kebijakan Pendidikan	<p>Kekuatan: sebagai pihak eksternal dengan keahlian tinggi namun memiliki aksesibilitas terbatas hanya dalam hal pengawasan, pengamatan dan perbaikan.</p> <p>Kepentingan: tidak begitu berpengaruh terhadap pribadi aktor sebab aktor ini sama sekali tidak memiliki tanggung jawab dalam mencapai keberhasilan sebuah kebijakan yang sedang dikaji.</p>
			<p>Partisipasi: berkomunikasi dengan membentuk aliansi guna mencapai tujuan organisasi.</p> <p>Perspektif: menciptakan kualitas hasil kebijakan yang jauh lebih baik dari sebelum adanya kebijakan.</p> <p>Aksesibilitas: tidak bisa mengatur secara detail (hanya sebagai pengawas dan pelaksana).</p> <p>Tindakan: menjamin kualitas hasil implementasi kebijakan dan pengawasan.</p>
			<p>Partisipasi: keahlian tinggi terhadap pemahaman kebijakan.</p> <p>Perspektif: terjadi pro kontra dalam menilai implementasi kebijakan.</p> <p>Aksesibilitas: terbatas tidak bisa mengatur sepenuhnya.</p> <p>Tindakan: memahami, mengamati dan menilai.</p>

Sumber: Diolah peneliti, 2021

3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian utama adalah kuesioner dan peneliti sendiri. Instrumen penelitian tambahan adalah *handphone*. Dalam kuesioner, terdapat sedikit perubahan bahasa untuk mempermudah informan mengisi kebutuhan data yang tersedia. Empat variabel implementasi sebagai kriteria uji dalam penelitian ini yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi selanjutnya diganti dengan komunikasi, kemampuan, kepribadian dan peraturan sesuai dengan pengertian yang peneliti kaji berdasarkan literatur-literatur terdahulu yang sudah membahas variabel implementasi sebelumnya.

3.6 Teknik Pengambilan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan diaplikasikan sebagai berikut:

3.6.1 Wawancara dan Kuesioner

Pengumpulan data utama menggunakan metode wawancara dan kuesioner dengan hasil berupa data awal yang belum diolah untuk mendapatkan hasil akhir. Wawancara dilakukan sebagai bahan untuk membuktikan bahwa hasil perhitungan nantinya sesuai dengan argumen yang disampaikan oleh informan dan sesuai dengan jawaban kuesioner mereka. Sedangkan kuesioner adalah daftar pertanyaan yang disiapkan oleh peneliti dimana tiap pertanyaannya berkaitan dengan masalah penelitian. Dengan menggunakan kuesioner, analisis berupaya mengukur apa yang ditemukan, selain itu juga untuk menentukan seberapa luas atau terbatasnya sentimen yang diekspresikan (Sugiyono, 2015).

Alasan menggunakan wawancara adalah untuk melengkapi kriteria pengelompokan informan dan sebagai media tambahan informasi untuk melakukan analisis data. Alasan peneliti menggunakan pengumpulan data melalui kuesioner adalah metode pengolahan data menggunakan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) membutuhkan data berupa kisaran nilai dalam bentuk angka yang selanjutnya akan diolah menggunakan rumus khusus *Analytical Hierarchy Process* (AHP).

Kuesioner juga dapat dibuat berstandar sehingga semua responden dapat diberi batasan dalam menjawab agar data hasil kuesioner tidak meluas dari fokus.

3.6.2 Observasi

Observasi merupakan suatu cara yang sangat bermanfaat, sistematis dan selektif dalam mengamati fenomena yang terjadi (Widi, 2010). Alasan peneliti menggunakan teknik observasi dalam pengumpulan data adalah menyelidiki atau mengamati hal-hal yang tidak di dalam kuesioner ataupun wawancara. Melalui metode ini peneliti bisa mengamati langsung fenomena ataupun data-data lain yang bentuknya non-kuisisioner sebagai data tambahan yang digunakan peneliti untuk menjawab rumusan masalah yang ada dan membuktikan bahwa hasil perhitungan selaras dengan kenyataan yang ada di lapangan.

3.7 Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar (Neuman, 2014). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) atau dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan istilah Proses Hirerarki Analisis yaitu sebagai berikut:

3.7.1 *Analytical Hierarchy Process* (AHP)

Metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) pada dasarnya didesain untuk menangkap secara rasional persepsi orang yang berhubungan dengan permasalahan tertentu melalui prosedur yang didesain untuk sampai pada suatu skala preferensi di antara berbagai alternatif (Sasongko dkk., 2017). Analisis ini ditunjukkan untuk membuat suatu model permasalahan yang tidak mempunyai struktur, biasanya ditetapkan untuk memecahkan masalah yang terukur (kuantitatif), masalah yang memerlukan pendapat (*judgement*) maupun pada situasi yang kompleks atau tidak terkerangka. Sistem penunjang keputusan

bertujuan menyediakan informasi, membimbing, memberikan prediksi serta mengarahkan kepada pengguna informasi (Hilda AM, 2015).

Beberapa teknik pengambilan keputusan di gunakan dalam analisis kebijakan. Pada hakekatnya AHP merupakan suatu model pengambil keputusan yang komprehensif dengan memperhitungkan hal-hal yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Dalam model pengambilan keputusan dengan AHP pada dasarnya berusaha menutupi semua kekurangan dari model- model sebelumnya. AHP juga memungkinkan kestruktur suatu sistem dan lingkungan kedalam komponen saling berinteraksi dan kemudian menyatukan mereka dengan mengukur dan mengatur dampak dari komponen kesalahan sistem (L. T. Saaty, 1993).

3.7.1.1 Definisi *Analitycal Hierarchy Process*(AHP)

Metode AHP (*Analytic Hierarchy Process*) adalah metode pendukung keputusan yang akan menguraikan masalah multi faktor atau multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hierarki. Menurut Saaty, hierarki didefinisikan menjadi suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multi level dimana level pertama adalah tujuan, yang diikuti level faktor, kriteria, sub kriteria, dan seterusnya ke bawah hingga level terakhir dari alternatif. Dengan hierarki suatu masalah kompleks dapat diuraikan menjadi kelompok- kelompoknya yang kemudian diatur menjadi suatu bentuk hierarki sehingga permasalahan menjadi terstruktur dan sistematis (L. T. Saaty, 1993).

AHP sering digunakan sebagai metode pemecahan masalah dibanding dengan metode yang lain karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Struktur yang berhirarki, sebagai konsekuensi dari kriteria yang dipilih, sampai pada sub kriteria yang paling dalam.

- b. Memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi berbagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh pengambil keputusan.
- c. Memperhitungkan daya tahan output analisis sensitivitas pengambilan keputusan (Hartono, 2013).

Penggunaan AHP dapat diaplikasikan untuk keperluan individu terutama untuk penelitian-penelitian yang berkaitan dengan kebijakan atau perumusan strategi prioritas. AHP dapat diandalkan karena dalam AHP suatu prioritas disusun dari berbagai pilihan yang dapat berupa kriteria yang sebelumnya telah didekomposisi (struktur) terlebih dahulu, sehingga penetapan prioritas didasarkan pada suatu proses yang terstruktur (hirarki) dan masuk akal (Fitriyani dan Ellya Hemud, 2016).

Jadi pada intinya AHP membantu memecahkan persoalan yang kompleks dengan menyusun suatu hirarki kriteria, dinilai secara subjektif oleh pihak yang berkepentingan lalu menarik berbagai pertimbangan guna mengembangkan bobot atau prioritas (kesimpulan). Peralatan utama AHP adalah sebuah hierarki fungsional dengan input utamanya persepsi manusia. Keberadaan hierarki memungkinkan dipecahnya masalah kompleks atau tidak terstruktur dalam sub – sub masalah, lalu menyusunnya menjadi suatu bentuk hierarki (Wibowo, 2015).

3.7.1.2 Prosedur *Analytical Hierarchy Process* (AHP)

Terdapat tiga prinsip utama dalam pemecahan masalah dalam AHP menurut Saaty, yaitu: *Decomposition*, *Comparative Judgement*, dan *Logical Consistency*. Secara garis besar prosedur AHP meliputi tahapan sebagai berikut (Irawan, 2018):

a. Dekomposisi masalah

Dekomposisi masalah adalah langkah dimana suatu tujuan (*Goal*) yang telah ditetapkan selanjutnya diuraikan secara sistematis kedalam struktur yang menyusun rangkaian sistem hingga tujuan dapat dicapai secara rasional. Dengan kata lain, suatu tujuan yang utuh, didekomposisi (dipecahkan) kedalam unsur penyusunnya.

b. Penilaian/pembobotan untuk membandingkan elemen-elemen

Apabila proses dekomposisi telah selesai dan hirarki telah tersusun dengan baik. Selanjutnya dilakukan penilaian perbandingan berpasangan (pembobotan) pada tiap-tiap hirarki berdasarkan tingkat kepentingan relatifnya.

c. Penyusunan matriks dan uji konsistensi

Apabila proses pembobotan atau pengisian kuisioner telah selesai, langkah selanjutnya adalah penyusunan matriks berpasangan untuk melakukan normalisasi bobot tingkat kepentingan pada tiap-tiap elemen pada hirarkinya masing-masing. Pada tahapan ini analisis dapat dilakukan secara manual ataupun dengan menggunakan program komputer seperti *Expert Choice*.

d. Penetapan prioritas pada masing-masing hirarki

Perlu dilakukan perbandingan berpasangan (*pairwise comparisons*). Nilai-nilai perbandingan relatif kemudian diolah untuk menentukan peringkat alternatif dari seluruh alternatif. Baik kriteria kualitatif, maupun kriteria kuantitatif, dapat dibandingkan sesuai dengan penilaian yang telah ditentukan untuk menghasilkan bobot dan prioritas. Bobot atau prioritas dihitung dengan manipulasi matriks atau melalui penyelesaian persamaan matematik.

e. Sintesis dari prioritas

Sintesis dari prioritas didapat dari hasil perkalian prioritas lokal dengan prioritas dari kriteria bersangkutan yang ada pada level atasnya dan menambahkannya ke masing-masing elemen dalam level yang dipengaruhi oleh kriteria. Hasilnya berupa gabungan atau lebih dikenal dengan istilah prioritas global yang kemudian dapat digunakan untuk memberikan bobot prioritas lokal dari elemen yang ada pada level terendah dalam hirarki sesuai dengan kriterianya.

f. Pengambilan/penetapan keputusan

Pengambilan keputusan adalah suatu proses dimana alternatif-alternatif yang dibuat dipilih yang terbaik berdasarkan kriterianya.

3.7.1.3 Kelemahan dan Kelebihan *Analitycal Hierarchy Process* (AHP)

Layaknya sebuah metode analisis, AHP pun memiliki kelebihan dan kelemahan dalam system analisisnya (Chamid, 2017). Kelebihan-kelebihan analisis ini adalah :

- a. Kesatuan (*Unity*) AHP membuat permasalahan yang luas dan tidak terstruktur menjadi suatu model yang fleksibel dan mudah dipahami. Kompleksitas (*Complexity*) AHP memecahkan permasalahan yang kompleks melalui pendekatan sistem dan pengintegrasian secara deduktif.
- b. Saling ketergantungan (*Inter Dependence*) AHP dapat digunakan pada elemen-elemen sistem yang saling bebas dan tidak memerlukan hubungan linier.
- c. Struktur Hirarki (*Hierarchy Structuring*) AHP mewakili pemikiran alamiah yang cenderung mengelompokkan elemen sistem ke level-level yang berbeda dari masing-masing level berisi elemen yang serupa.

- d. Pengukuran (*Measurement*) AHP menyediakan skala pengukuran dan metode untuk mendapatkan prioritas.
- e. Konsistensi (*Consistency*) AHP mempertimbangkan konsistensi logis yang digunakan untuk menentukan prioritas.
- f. Sintesis (*Synthesis*) AHP mengarah pada perkiraan keseluruhan mengenai seberapa diinginkannya masing-masing alternatif.
- g. *Trade Off* AHP mempertimbangkan prioritas relatif faktor-faktor pada sistem sehingga orang mampu memilih alternatif terbaik berdasarkan tujuan mereka.
- h. Penilaian dan Konsensus (*Judgement and Consensus*) AHP tidak mengharuskan adanya suatu konsensus, tapi menggabungkan hasil penilaian yang berbeda.
- i. Pengulangan Proses (*Process Repetition*) AHP membuat orang menyaring definisi suatu permasalahan dan mengembangkan penilaian dari pengertian melalui proses pengulangan.

Sedangkan kelemahan metode AHP adalah sebagai berikut:

- a. Ketergantungan model AHP pada input utamanya. Input utama ini berupa persepsi seorang ahli sehingga dalam hal ini melibatkan subyektifitas sang ahli selain itu juga model menjadi tidak berarti jika ahli tersebut memberikan penilaian yang keliru.
- b. Metode AHP ini hanya metode matematis tanpa ada pengujian secara statistik sehingga tidak ada batas kepercayaan dari kebenaran model yang terbentuk.

3.7.2 Tahapan *Analytical Hierarchy Process* (AHP)

Dalam metode AHP dilakukan langkah-langkah sebagai berikut (Munthafa dan Mubarok, 2017) :

3.7.2.1 Mendefinisikan Masalah dan Menentukan Solusi

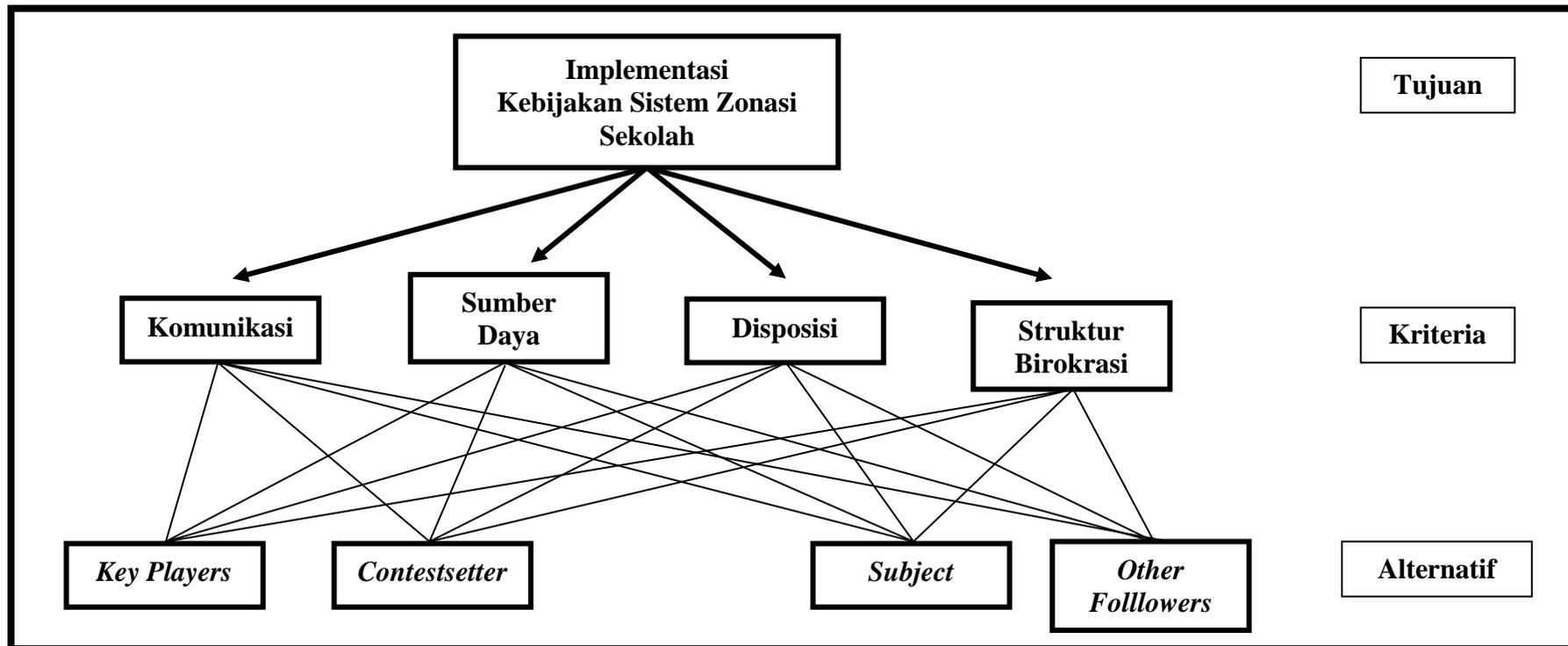
Dalam tahap ini kita berusaha menentukan masalah yang akan kita pecahkan secara jelas, detail dan mudah dipahami. Dari

masalah yang ada kita coba tentukan solusi yang mungkin cocok bagi masalah tersebut. Solusi dari masalah mungkin berjumlah lebih dari satu. Solusi tersebut nantinya kita kembangkan lebih lanjut dalam tahap berikutnya.

Berawal dari permasalahan kurang meratanya akses dan mutu pendidikan di Indonesia maka lahirlah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 20 Tahun 2019 yang menurunkan sebuah kebijakan bernama Sistem Zonasi Sekolah. Dalam menjalankan kebijakan terdapat variabel implementasi dan aktor implementasi yang terlibat. Penelitian ini berusaha mencari hierarki kepentingan peran aktor implementasi berdasarkan variabel implementasi dalam implementasi Kebijakan Sistem Zonasi.

3.7.2.2 Membuat Struktur Hirarki yang Diawali dengan Tujuan Utama

Setelah menyusun tujuan utama sebagai level teratas akan disusun level hirarki yang berada di bawahnya yaitu kriteria-kriteria yang cocok untuk mempertimbangkan atau menilai alternatif yang kita berikan dan menentukan alternatif tersebut. Tiap kriteria mempunyai intensitas yang berbeda-beda. Berikut adalah struktur hiarki penelitian:



Gambar 3 Struktur Hierarki Dalam Penelitian.

Sumber: diolah peneliti, 2021

Keterangan:

- a. Tingkat 1 : *Goal* / Fokus adalah apa yang menjadi permasalahan yang ingin dipecahkan melalui AHP. Dalam hal ini yang ingin dipecahkan adalah variabel implementasi kebijakan Sistem Zonasi Sekolah.
- b. Tingkat 2 : Kriteria adalah hal-hal yang menjadi kriteria dari fokus. Dalam gambar di atas kriteria aktor yaitu; komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.
- c. Tingkat 3 : Alternatif berupa golongan aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan Sistem Zonasi Sekolah yaitu golongan *key player*, *contestsetter*, *subject*, dan *other followers*.

3.7.2.3 Membuat Matriks Perbandingan Berpasangan

Matriks ini menggambarkan kontribusi relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap tujuan atau kriteria yang setingkat di atasnya Matriks yang digunakan bersifat sederhana, memiliki kedudukan kuat untuk kerangka konsistensi. Pendekatan dengan matriks mencerminkan aspek ganda dalam prioritas yaitu mendominasi dan didominasi. Perbandingan dilakukan berdasarkan judgment dari pengambil keputusan dengan menilai tingkat kepentingan suatu elemen dibandingkan elemen lainnya.

Tabel 6. Matriks Perbandingan Berpasangan Dalam Penelitian

	Komunikasi (1)	Sumber Daya (2)	Disposisi (3)	Struktur Birokrasi (4)
<i>Key Players</i> (a)	1a	2a	3a	4a
<i>Contentsetter</i> (b)	1b	2b	3b	4b
<i>Subject</i> (c)	1c	2c	3c	4c
<i>Other Followers</i> (d)	1d	2d	3d	4d

Sumber: diolah peneliti, 2021

3.7.2.4 Mendefinisikan Perbandingan Berpasangan

Hasil perbandingan dari masing-masing elemen akan berupa angka dari 1 sampai 9 yang menunjukkan perbandingan tingkat kepentingan suatu elemen. Apabila suatu elemen dalam matriks dibandingkan dengan dirinya sendiri maka hasil perbandingan diberi nilai 1. Hasil perbandingan tersebut diisikan pada sel yang bersesuaian dengan elemen yang dibandingkan. Skala perbandingan perbandingan berpasangan dan maknanya sebagai berikut:

Tabel 7. Skala Perbandingan Berpasangan

Intensitas Kepentingan	Definisi	Penjelasan
1	Kedua elemen sama pentingnya	Dua elemen menyumbangannya sama besar pada sifat itu
3	Elemen yang satu sedikit lebih penting ketimbang yang lainnya	Pengalaman atau pertimbangan sedikit menyokong satu elemen atas yang lainnya
5	Elemen yang satu esensial atau sangat penting ketimbang elemen yang lainnya	Pengalaman atau pertimbangan dengan kuat menyokong satu elemen atas elemen lainnya
7	Satu elemen jelas lebih penting dari elemen lainnya	Satu elemen dengan kuat disokong dan dominannya telah terlihat dalam praktek
9	Satu elemen mutlak lebih penting ketimbang elemen yang lainnya	Bukti yang menyokong elemen yang satu atas yang lain memiliki tingkat penegasan tertinggi yang mungkin menguatkan
2,4,6,8	Nilai-nilai di antara dua pertimbangan yang berdekatan	Kompromi diperlukan antara dua pertimbangan
Kebalikan	Jika untuk aktivitas i mendapatkan satu angka bila dibandingkan dengan aktivitas j maka j mempunyai nilai kebalikannya bila dibandingkan dengan i	

Sumber : (Oktafianto dkk., 2018)

3.7.2.5 Menghitung Nilai Eigen dan Menguji Konsistensinya

Jika tidak konsisten maka pengambilan data diulangi.

3.7.2.6 Mengulangi langkah 3,4, dan 5

Untuk seluruh tingkat hirarki.

3.7.2.7 Menghitung Vektor Eigen dari Setiap Matriks Perbandingan Berpasangan

Hal ini merupakan bobot setiap elemen untuk penentuan prioritas elemen-elemen pada tingkat hirarki terendah sampai mencapai tujuan. Penghitungan dilakukan lewat cara menjumlahkan nilai setiap kolom dari matriks, membagi setiap nilai dari kolom dengan total kolom yang bersangkutan untuk memperoleh normalisasi matriks, dan menjumlahkan nilai-nilai dari setiap baris dan membaginya dengan jumlah elemen untuk mendapatkan rata-rata. Apabila A adalah matriks perbandingan berpasangan, maka vektor bobot yang berbentuk (Amarullah dan Simanjorang, 2020):

$$“(A)(wT) = (n)(wT)”$$

dapat didekati dengan cara:

- a. Menormalkan setiap kolom j dalam matriks A, sedemikian hingga:

$$“\sum a(i,j) i=1”$$

sebut sebagai A’.

Maka dalam penelitian ini dihasilkan data sebagai berikut:

Tabel 8. Jumlah Normalisasi Variabel Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah

Kriteria: Variabel Implementasi	Jumlah Normalisasi
Komunikasi	0,87
Sumber Daya	1,15
Disposisi	0,75
Struktur Birokrasi	1,23
JUMLAH	4,00

Sumber: Diolah peneliti, 2021

Tabel 9. Jumlah Normalisasi Aktor Implementasi terhadap Variabel Komunikasi

Alternatif terhadap Kriteria (Aktor terhadap Komunikasi)	Jumlah Normalisasi
Dinas Pendidikan	1,62
Musyawahar Kerja Kepala Sekolah	1,42
DPRD	0,86
Dewan Pendidikan Lampung	0,88
Ikatan Guru Indonesia	0,81
Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan	0,87
Dosen Manajemen Pendidikan	0,81
Pengamat Kebijakan Pendidikan	0,73
JUMLAH	8,00

Sumber: Diolah peneliti, 2021

Tabel 10. Jumlah Normalisasi Aktor Implementasi terhadap Variabel Sumber Daya

Alternatif terhadap Kriteria (Aktor terhadap Komunikasi)	Jumlah Normalisasi
Dinas Pendidikan	3,34
Musyawahar Kerja Kepala Sekolah	1,60
DPRD	1,41
Dewan Pendidikan Lampung	1,03
Ikatan Guru Indonesia	0,55

Tabel 10 (lanjutan)

Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan	0,96
Dosen Manajemen Pendidikan	0,44
Pengamat Kebijakan Pendidikan	0,33
JUMLAH	8,00

Sumber: Diolah peneliti, 2021

Tabel 11. Jumlah Normalisasi Aktor Implementasi terhadap Variabel Disposisi

Alternatif terhadap Kriteria (Aktor terhadap Komunikasi)	Jumlah Normalisasi
Dinas Pendidikan	2,48
Musyawahar Kerja Kepala Sekolah	1,44
DPRD	1,00
Dewan Pendidikan Lampung	1,17
Ikatan Guru Indonesia	0,88
Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan	0,90
Dosen Manajemen Pendidikan	0,93
Pengamat Kebijakan Pendidikan	0,56
JUMLAH	8,00

Sumber: Diolah peneliti, 2021

Tabel 12. Jumlah Normalisasi Aktor Implementasi terhadap Variabel Struktur Birokrasi

Alternatif terhadap Kriteria (Aktor terhadap Komunikasi)	Jumlah Normalisasi
Dinas Pendidikan	1,72
Musyawahar Kerja Kepala Sekolah	2,32
DPRD	1,10
Dewan Pendidikan Lampung	1,27
Ikatan Guru Indonesia	0,47
Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan	0,99
Dosen Manajemen Pendidikan	0,51
Pengamat Kebijakan Pendidikan	0,48
JUMLAH	8,00

Sumber: Diolah peneliti, 2021

- b. Hitung nilai rata-rata untuk setiap baris i dalam A' :

$$w_i = 1/n \sum_j a(i,j)$$

dengan: w_i adalah bobot tujuan ke- i dari vektor bobot (Amarullah dan Simanjorang, 2020).

Maka dalam penelitian ini dihasilkan data sebagai berikut:

Tabel 13. Rata-rata Normalisasi Variabel Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah

Kriteria: Variabel Implementasi	Rata-rata Normalisasi
Komunikasi	0,22
Sumber Daya	0,29
Disposisi	0,19
Struktur Birokrasi	0,31
JUMLAH	1,00

Sumber: Diolah peneliti, 2021

Tabel 14. Rata-rata Normalisasi Aktor Implementasi terhadap Variabel Komunikasi

Alternatif terhadap Kriteria (Aktor terhadap Komunikasi)	Rata-rata Normalisasi
Dinas Pendidikan	0,20
Musyawarah Kerja Kepala Sekolah	0,18
DPRD	0,11
Dewan Pendidikan Lampung	0,11
Ikatan Guru Indonesia	0,10
Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan	0,11
Dosen Manajemen Pendidikan	0,10
Pengamat Kebijakan Pendidikan	0,09
JUMLAH	1,00

Sumber: Diolah peneliti, 2021

Tabel 15. Rata-rata Normalisasi Aktor Implementasi terhadap Variabel Sumber Daya

Alternatif terhadap Kriteria (Aktor terhadap Komunikasi)	Rata-rata Normalisasi
Dinas Pendidikan	0,21
Musyawahar Kerja Kepala Sekolah	0,17
DPRD	0,13
Dewan Pendidikan Lampung	0,13
Ikatan Guru Indonesia	0,10
Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan	0,11
Dosen Manajemen Pendidikan	0,08
Pengamat Kebijakan Pendidikan	0,08
JUMLAH	1,00

Sumber: Diolah peneliti, 2021

Tabel 16. Rata-rata Normalisasi Aktor Implementasi terhadap Variabel Disposisi

Alternatif terhadap Kriteria (Aktor terhadap Komunikasi)	Rata-rata Normalisasi
Dinas Pendidikan	0,18
Musyawahar Kerja Kepala Sekolah	0,13
DPRD	0,13
Dewan Pendidikan Lampung	0,13
Ikatan Guru Indonesia	0,11
Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan	0,11
Dosen Manajemen Pendidikan	0,11
Pengamat Kebijakan Pendidikan	0,10
JUMLAH	1,00

Sumber: Diolah peneliti, 2021

Tabel 17. Rata-rata Normalisasi Aktor Implementasi terhadap Variabel Struktur Birokrasi

Alternatif terhadap Kriteria (Aktor terhadap Komunikasi)	Rata-rata Normalisasi
Dinas Pendidikan	0,18
Musyawarah Kerja Kepala Sekolah	0,17
DPRD	0,13
Dewan Pendidikan Lampung	0,14
Ikatan Guru Indonesia	0,09
Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan	0,12
Dosen Manajemen Pendidikan	0,09
Pengamat Kebijakan Pendidikan	0,09
JUMLAH	1,00

Sumber: Diolah peneliti, 2021

3.7.2.8 Memeriksa Konsistensi Hirarki

Tahapan ini diukur dalam AHP adalah rasio konsistensi dengan melihat index konsistensi. Konsistensi yang diharapkan adalah yang mendekati sempurna agar menghasilkan keputusan yang mendekati valid. Misal A adalah matriks perbandingan berpasangan dan w adalah vektor bobot, maka konsistensi dari vektor bobot w dapat diuji (T. L. Saaty, 2004).

a. Hitung: $(A)(w^T)$ atau λ maksimal:

$$t = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{\text{elemen ke } - i \text{ pada } (A)(w^T)}{\text{elemen ke } - i \text{ pada } w^T} \right)$$

Maka dalam penelitian ini dihasilkan data sebagai berikut:

Tabel 18. Lamda Maksimal (t) tiap Elemen

Elemen	Lamda Maksimal (t)
Kriteria: Variabel Implementasi	4,09
Alternatif terhadap Kriteria: Aktor Implementasi terhadap Komunikasi	8,58
Alternatif terhadap Kriteria: Aktor Implementasi terhadap Sumber Daya	8,58
Alternatif terhadap Kriteria: Aktor Implementasi terhadap Disposisi	8,95
Alternatif terhadap Kriteria: Aktor Implementasi terhadap Struktur Birokrasi	8,25

Sumber: Diolah peneliti, 2021

b. Hitung indeks konsistensi:

$$CI = \frac{t - n}{n - 1}$$

Di mana:

- CI = Rasio penyimpangan (deviasi) konsistensi (*consistency index*)
- Maks = *eigen value maksimum* λ
- n = ukuran matriks

Tabel 19. Consistency Index (CI) tiap Elemen

Elemen	Consistency Index (CI)
Kriteria: Variabel Implementasi	0,03
Alternatif terhadap Kriteria: Aktor Implementasi terhadap Komunikasi	0,08
Alternatif terhadap Kriteria: Aktor Implementasi terhadap Sumber Daya	0,08

Tabel 19 (lanjutan)

Alternatif terhadap Kriteria: Aktor Implementasi terhadap Disposisi	0,14
Alternatif terhadap Kriteria: Aktor Implementasi terhadap Struktur Birokrasi	0,04

Sumber: Diolah peneliti, 2021

- c. Indeks random (Tabel IR) adalah satuan nilai berbeda tergantung banyaknya n (elemen) (T. L. Saaty, 2004) diberikan sebagai berikut:

1	2	3	4	5	6	7	8
0,00	0,00	0,58	0,90	1,12	1,24	1,32	1,41

- d. Hitung rasio konsistensi

$$CR = \frac{CI}{RI_n}$$

Jika $CI = 0$, maka hierarki konsisten. Jika $CR \leq 0,1$, maka hierarki cukup konsisten. Jika $CR \geq 0,1$, maka hierarki sangat tidak konsisten.

Tabel 20. Consistency Ratio (CR) tiap Elemen

Elemen	Consistency Index (CI)
Kriteria: Variabel Implementasi	0,03
Alternatif terhadap Kriteria: Aktor Implementasi terhadap Komunikasi	0,06
Alternatif terhadap Kriteria: Aktor Implementasi terhadap Sumber Daya	0,06
Alternatif terhadap Kriteria: Aktor Implementasi terhadap Disposisi	0,10
Alternatif terhadap Kriteria: Aktor Implementasi terhadap Struktur Birokrasi	0,03

Sumber: Diolah peneliti, 2021

IV. GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1 Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah Provinsi Lampung Tahun 2019

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung mulai menerapkan seluruh SMA di Lampung menggunakan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2019/2020, sistem zonasi masing-masing SMA berdasarkan kuota dan ketentuan siswa. PPDB SMA berdasarkan sistem zonasi di Lampung mulai Senin 17 Juni 2019 hingga Rabu 19 Juni 2019. Hasilnya diumumkan pada 20 Juni 2019, dan daftar ulang pada 20-22 Juli 2019. Sedangkan Masa Pengenalan Lingkungan Siswa (MPLS) pada 15-17 Juli 2019. Sedangkan awal proses belajar mengajar di sekolah mulai 15 Juli 2019 (Republika, 2019).

Sistem PPDB zonasi tingkat SMA di Lampung dapat dilakukan dengan cara online dan datang langsung ke SMA yang dituju. Sistem zonasi PPDB tingkat SMA berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019. Mengacu peraturan tersebut, sistem PPDB berdasarkan sistem zonasi sebanyak 80 persen, prestasi (15 persen), dan perpindahan tugas orang tua/wali (5 persen). Sistem PPDB berdasarkan zonasi untuk memberikan kesempatan bagi warga negara usia sekolah untuk memilih sekolah berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan. Warga negara bebas menentukan sekolah secara obyektif, akuntabel, transparan, dan tidak diskriminatif.

Selain menerima peserta didik baru berdasarkan zonasi, PPDB yang menggunakan sistem online tersebut menampung siswa berprestasi secara berjenjang, perpindahan tugas orang tua, dan mengakomodasi calon peserta didik dari keluarga kurang mampu. Tujuan dari PPDB sistem zonasi untuk mewujudkan pemerataan di bidang pendidikan bagi warga negara sehingga terjadi peningkatan kualitas pendidikan, dan relevansi daya saing pendidikan. Dalam hal ini, pemerintah ingin memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak usia sekolah memperoleh pendidikan yang baik. Penerimaan siswa baru lewat sistem zonasi diharapkan dapat berlangsung secara obyektif, transparan, dan akuntabel, serta tidak diskriminatif. Sehingga tujuan pemerataan dan kualitas pendidikan dapat tercapai.

Sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi : (1) setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Makna ayat 1 pasal 31 UUD 1945 tersebut bahwa pendidikan berhak didapatkan setiap warga negara tanpa terkecuali. Memperoleh pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis agama, dan gender. Pemerintah berupaya untuk memberikan pendidikan kepada seluruh warga Negara melalui pemerataan akses pendidikan.

Adanya pemerataan akses pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (*life skills*) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Keberhasilan meningkatkan akses pendidikan berdampak positif terhadap kualitas SDM dan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan akses pendidikan ditunjukkan dengan meningkatnya partisipasi penduduk usia sekolah yang mendapat pendidikan. Penuntasan akses pendidikan merupakan prioritas pembangunan pendidikan di Indonesia. Selain peningkatan akses pendidikan, pemerataan mutu pendidikan juga sedang diprogramkan pemerintah.

Peraturan tentang PPDB Zonasi Sekolah secara nasional terbaru (sebelum masa pandemi *covid-19* terjadi) tertuang dalam Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019. Selanjutnya, peraturan yang berlaku secara nasional tadi diturunkan berbeda di tiap-tiap daerah. Di Provinsi Lampung misalnya, peraturan mengenai PPDB Zonasi terbaru untuk tingkat SMA Provinsi Lampung tertuang dalam **Peraturan Gubernur Lampung Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Provinsi Lampung.**

4.2 Prinsip Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Sekolah Menengah Atas di Provinsi Lampung

PPDB dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Obyektif, bahwa PPDB bersifat netral dan bebas dari kepentingan serta tekarian pihak lain yang menyalahgunakan wewenang;
- b. Transparan, bahwa PPDB terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat dan orang tua/wali calon peserta didik;
- c. Akuntabel, bahwa PPDB dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. book proses, prosedur, dan hasilnya.

4.3 Penyelenggara serta Tugas dan Wewenang Penyelenggara dalam Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Sekolah Menengah Atas di Provinsi Lampung

- a. Penyelenggara PPDB Tingkat Provinsi: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

Tugas dan Wewenang Penyelenggara PPDB Tingkat Provinsi:

1. Menyiapkan Petunjuk Teknis PPDB.
2. Mensosialisasikan kebijakan pelaksanaan PPDB kepada UPT Layanan Dikmen PK-PLK, Sekolah, dan masyarakat.
3. Mengendalikan, memonitor, dan mengevaluasi pelaksanaan PPDB.
4. Membentuk Tim Monitoring PPDB di setiap UPT Dikmen PK-PLK.
5. Memberikan pelayanan informasi dan pengaduan.
6. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada Gubernur.

b. Penyelenggara PPDB Tingkat Sekolah: Kepala Sekolah.

Tugas dan Wewenang Penyelenggara PPDB Tingkat Sekolah:

1. Mensosialisasikan PPDB kepada calon peserta didik dan masyarakat.
2. Membentuk panitia PPDB Sekolah.
3. Melaksanakan PPDB.
4. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama pelaksanaan PPDB.
5. Membantu calon peserta didik/orang tuaywali dalam melakukan pendaftaran.
6. Memberikan pelayanan informasi dan pengaduan.
7. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas.

4.4 Jumlah Batas Kecamatan dan Daya Tampung tiap Kota/Kabupaten Tingkat Sekolah Menengah Atas Provinsi Lampung

Berdasarkan pasal 12 ayat 1 poin b Peraturan Gubernur Lampung Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Provinsi Lampung yang berbunyi “Seleksi calon peserta didik baru jalur zonasi dilakukan berdasarkan zona tempat tinggal calon peserta didik dengan lokasi sekolah yang dipilih dengan ketentuan: Zona ditentukan berdasarkan kecamatan tempat satuan pendidikan berada dan ditambah dengan seluruh kecamatan yang berbatasan langsung dengan kecamatan yang dimaksud.” Maka didapatkan data jumlah kecamatan tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

Berdasarkan pasal 7 ayat 1 dan 2 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Provinsi Lampung yang berbunyi: “(1) Jumlah peserta didik baru yang diterima dalam 1 (satu) rombongan belajar di SMA diterapkan oleh Kepala Dinas. (2) Jumlah rombongan belajar yang diterima di 1 (satu) sekolah disesuaikan dengan ketersediaan ruang belajar.” Maka didapatkan data jumlah daya tampung calon siswa SMA tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Kedua data tersebut digabungkan dalam sebuah tabel berikut:

Tabel 21. Jumlah Batas Kecamatan dan Daya Tampung tiap Kota/Kabupaten Tingkat Sekolah Menengah Atas Provinsi Lampung

No	Jumlah Sekolah	Jumlah Kecamatan	Daya Tampung		
			IPA	IPS	Total
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN					
1.	18	17	1277	1230	2507
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH					
2.	24	28	2349	2150	4499
KABUPATEN LAMPUNG UTARA					
3.	24	23	2233	1813	4046
KABUPATEN LAMPUNG BARAT					
4.	15	15	989	1025	2014
KABUPATEN TULANG BAWANG					
5.	16	15	974	914	1888
KABUPATEN TANGGAMUS					
6.	17	20	1435	1394	2829
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR					
7.	20	24	2471	2227	4698
KABUPATEN WAY KANAN					
8.	24	14	1452	1445	2897
KOTA BANDAR LAMPUNG					
9.	17	20	3091	2290	5381
KOTA METRO					
10.	6	5	966	754	1720
KABUPATEN PESAWARAN					
11.	13	11	1523	1208	2731
KABUPATEN MESUJI					
12.	9	7	259	309	568
KABUPATEN PRINGSEWU					
13.	10	9	1597	1192	2789
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT					
14.	15	9	856	1117	1973
KABUPATEN PESISIR BARAT					
15.	9	11	557	694	1251

Sumber: (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, 2019)

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil olah data menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dengan menguji aktor implementasi kebijakan Sistem Zonasi Sekolah terhadap variabel implementasi kebijakan Sistem Zonasi Sekolah maka didapatkan beberapa simpulan hierarki dan *eigen vector* tiap elemen sebagai berikut;

- a. Hierarki kepentingan variabel implementasi dan bentuk penerapannya berdasarkan teori George C. Edward (1980) yaitu;
 1. Struktur Birokrasi (*eigen vector*: 0,31)
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 24 Tahun 2019.
 2. Sumber Daya (*eigen vector*: 0,29)
Aktor yang memiliki latar belakang sesuai dengan kebijakan Sistem Zonasi Sekolah, informasi valid yang mampu menjadi referensi, fasilitas penunjang kemampuan seperti teknologi mutakhir dan pelatihan secara rutin yang ditujukan kepada aktor implementasi.
 3. Komunikasi (*eigen vector*: 0,22)
Rapat skala nasional yang dipimpin oleh Kemendikbud pada akhir tahun 2018 yang menghasilkan kesepakatan bahwa tetap dilanjutkannya PPDB Zonasi pada tahun 2019, rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung pada 24 Juni 2019 mengesahkan sekaligus menetapkan Peraturan Gubernur Lampung nomor 24 Tahun 2019.

4. Disposisi (*eigen vector*: 0,19)

Aktor yang terlibat di dalam implementasi kebijakan Zonasi memiliki pandangan mendasar yang sama yaitu berpedoman pada ideologi Pancasila dan memegang teguh UUD 1945 sebagai landasan konsitusional, pola bersikap dan bertindak masing-masing aktor juga dibatasi oleh Kode Etik dari tiap lembaga atau organisasi dimana aktor tersebut bernaung yang biasanya tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang berbeda tiap organisasi atau lembaga.

b. Hierarki kepentingan peran aktor implementasi dan bentuk penerapannya dalam segala variabel berdasarkan teori Thompson (1990) yaitu;

1. *Key Players*

1.1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung (*eigen vector*: 0,19)

Menangani proses implementasi kebijakan Zonasi secara intensif dan bertanggung jawab dan menaungi segala bentuk peran aktor dalam kebijakan.

1.2 Majelis Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Lampung (*eigen vector*: 0,17)

Menyampaikan segala informasi berkaitan dengan kebijakan Zonasi dan juga bertanggung jawab akan keberhasilan implementasi kebijakan di sekolah mereka masing-masing.

2. *Contestsetter*

2.1 Dewan Pendidikan Lampung (DPL) (*eigen vector*: 0,13)

Ikut serta dalam meninjau kembali dan melakukan penilaian intensif terhadap kebijakan pendidikan itu disahkan guna memberi masukan dan mempertahankan segala sesuatu yang menunjang tercapainya tujuan kebijakan.

2.2 Komisi V DPRD Provinsi Lampung (*eigen vector*: 0,12)

Menyatukan antara kepentingan negara dan kebutuhan masyarakat yang nantinya akan dituangkan dalam sebuah kebijakan yang disetujui bersama berkaitan dengan pendidikan daerah.

3. *Subject*

3.1 Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) (*eigen vector: 0,11*)

Memberikan pelatihan bagi para tenaga pendidik atau pengajar secara berkala dengan menyesuaikan perubahan yang ada termasuk sejak hadirnya kebijakan Sistem Zonasi Sekolah.

3.2 Ikatan Guru Indonesia (IGI) (*eigen vector: 0,10*)

Memahami arti dari kebijakan Zonasi dan menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi sejak berlakunya kebijakan tersebut

4. *Other Followers*

4.1 Dosen Manajemen Pendidikan (*eigen vector:0,09*)

Memberikan masukan dan arahan berdasarkan literatur resmi mengenai kebijakan Zonasi atau kebijakan sejenisnya melalui sebuah forum baik formal ataupun non formal sehingga kebijakan tersebut dapat didesain sebaik mungkin dan terarah.

4.2 Pengamat Kebijakan Pendidikan (*eigen vector:0,09*)

Melakukan analisis, penilaian dan tinjauan lebih lanjut serta berulang bagi kebijakan Zonasi guna menghilangkan kesalahan yang sudah terjadi dan menghindari kesalahan yang akan terjadi.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan kekurangan dalam proses implementasi kebijakan Sistem Zonasi Sekolah, berikut adalah saran peneliti:

1. Dalam konteks struktur birokrasi, penegasan kembali aturan penggunaan Kartu Keluarga sebagai dokumen pendukung yang menunjukkan tempat tinggal siswa harus lebih ditingkatkan agar tidak adanya penggunaan data palsu melalui penambahan anggota keluarga baru dalam Kartu Keluarga.
2. Dalam konteks sumber daya, penyaringan staff perlu dilakukan agar staff yang tergabung dalam sebuah dinas/ organisasi/ lembaga yang juga merupakan bagian dari aktor implementasi diisi oleh orang-orang dengan latar belakang pendidikan yang sesuai.

3. Dalam konteks komunikasi, perlu diadakan pengawasan terhadap pertemuan-pertemuan, sebab pemangkasan anggaran pengeluaran berdampak pada pengurangan waktu pelaksanaan pertemuan antar aktor yang akhirnya menyebabkan pertemuan yang ada kurang efisien.
4. Dalam konteks disposisi, kesadaran akan perlunya kerjasama perlu ditingkatkan, para aktor harus mengurangi kontroversi dari peran masing-masing dan menghilangkan stigma bahwa ada aktor implementasi kebijakan yang bahkan tidak berfungsi sama sekali.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abidin, S. Z. 2004. *Kebijakan Publik*. Pancar Siwah. Jakarta. 309 halaman.
- Agustino, L. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. CV. Alfabeta. Jakarta. 234 halaman.
- Anderson, James, A. 1997. *Public Policy Making Third Edition*. Houghton Mifflin Company. USA. 384 halaman.
- Bungin, B. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah ragam Varian Kontemporer*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 320 halaman.
- Dunn, W. 2004. *Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. 687 halaman.
- Dye, T. R. 1978. *Understanding Public Policy*. Englewood Cliff. New Jersey. 378 halaman.
- Easton, D. 1953. *The Political System*. Knopf. New York. 268 halaman.
- Edward III, G. C. (n.d.). 1990. *Public Policy Implementing*. Jai Press Inc. London-England. 662 halaman.
- Eyestone, R. 1971. *The Treads of Public Policy; A Study in Policy Leadership*. Boobs-Merrill. San Fransisco. 555 halaman.

- Fuad, A. dan K. S. N. 2014. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. PT Graha Ilmu. Yogyakarta. 105 halaman.
- Gortner, H. 1984. *Administration in The Public Sector*. John Willy. New York. 264 halaman.
- Jenkins, W. I. 1978. *Policy Analysis*. Martin Robertson. Oxford. 278 halaman.
- Jones, C. O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Publik Policy)* (Ricky Ismanto (ed.)). PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 490 halaman.
- Kadji, Y. 2008. *Implementasi Kebijakan: Dalam Perspektif Realitas*. Cahaya Abadi. Tulung Agung. 118 halaman.
- Kirk, J. dan M. L. M. 1986. *Reliability and Validity in Qualitative Research*. SAGE Publications. London. 280 halaman.
- Lasswell, H.D & Kaplan, A. 1970. *Power and Society*. Yale University Press. New Heaven. 295 halaman.
- Lester, J. P. dan S. J. 2000. *Public Policy An Evolutionary Approach*. Wadsworth. USA. 272 halaman.
- Madani, M. 2011. *Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*. Graha Ilmu. Yogyakarta. 210 halaman.
- Meutia, I. F. 2017. *Analisis Kebijakan Publik*. AURA CV. Anugrah Utama Raharja. Lampung. 204 halaman.
- Moleong, L. J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung. 424 halaman.
- Naihasyi, S. 2006. *Kebijakan Publik Menggapai Masyarakat Madani*. Mida Pustaka. Yogyakarta. 210 halaman.

- Nakamura, R. T. and F. S. 1980. *The Politics of Policy Implementation*. St. Martin's Press. New York. 201 halaman.
- Neuman, W. 2014. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches Seventh Edition*. Pearson Education Limited. Jakarta. 594 halaman.
- Nugroho, D. R. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta. 320 halaman.
- Nugroho, D. R. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara Berkembang*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta. 266 halaman.
- Parsons, W. 2006. *Public Policy* (Tri Wibowo Budo Santoso (ed.)). Kencana. Jakarta. 469 halaman.
- Purwanto dan Sulistyastuti. 1991. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Bumi Aksara. Jakarta. 239 halaman.
- Saaty, L. T. 1993. *Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin*. PT Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta. 270 halaman.
- Salusu, J. 2003. *Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. Grafindo. Jakarta. 319 halaman.
- Starling, G. 1977. *Managing The Public Sector*. Dorsey Press. USA. 624 halaman.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 138 halaman.
- Sugiarto, E. 2015. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. CV Solusi Distribusi. Yogyakarta. 202 halaman,
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Alfabeta. Jakarta. 630 halaman.

- Sunggono, B. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Sinar Grafika. Jakarta. 191 halaman.
- Syafiie, I. K. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. PT. Rineka Cipta. Jakarta. 268 halaman.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI Bandung- Puslit KP2W lemlit UNPAD. Bandung. 392 halaman.
- Tangkilisan, S Nogi, H. 2002. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Balirung & Co. Yogyakarta, 306 halaman.
- Thompson, J. D. 1967. *Organizations in Action*. McGraw-Hill. New York. 476 halaman.
- Udoji, C. J. 1981. *The African Public Servant as a Public Policy Maker, Public Policy in Africa, Africa Assosiation for Public Administration and Management*. Addis Abeba. USA. 480 halaman.
- Wahab, S. A. 2012. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara. Jakarta. 272 halaman.
- Wibawa, Samodra, dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 466 halaman.
- Widi, R. K. 2010. *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Graha Ilmu. Yogyakarta. 395 halaman.
- Widodo. 2010. *Implementasi Kebijakan*. Andi Offset. Yogyakarta. 212 halaman.
- Wilson, J. Q. 1989. *Bureaucracy: What Government Agencies Do and Why They Do it, Basic Books a Division of Harpar*. Collins Publishers. US. 464 halaman.
- Winarno, B. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. CAPS.

Yogyakarta. 274 halaman.

Yownis, T. 1990. *Implementation of Public Policy*. Darmouth. Sydney. 317 halaman.

Jurnal:

Afandi, Ibnu, M., & Warjio. 2015. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dalam Pencapaian Target Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Deskriptif Di Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat). *Jurnal Administrasi Publik*. 6(2). 92–113.

Amarullah, R., & Simanjorang, R. M. 2020. Planning Decision Support System Using Building Mall AHP (Analytical Hierarchy Process). *Jurnal Teknik Informatika C.I.T.* 12(1). 26–33.
<https://doi.org/10.35335/cit.Vol12.2020.19.pp26-33>

Chamid, A. A. dan A. C. M. 2017. Kombinasi Metode AHP dan TOPSIS pada Sistem Pendukung Keputusan. *Prosiding SNATIF Ke -4 Tahun 2017*. 115–119. [10.35143/JKT.V6I2.3642](https://doi.org/10.35143/JKT.V6I2.3642).

Fauzi, A. N., & Dewi Rostyaningsih. 2018. Analisis Peran Aktor Dalam Formulasi Kebijakan Semarang Smart City. *Journal of Public Policy and Management Review*. 7(4). 1–18. [10.14710/jppmr.v7i4.22052](https://doi.org/10.14710/jppmr.v7i4.22052).

Fitriyani; Ellya Hemud. 2016. Pemilihan paket Internet Android pada Operator Telepon GSM Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP). *Jurnal Sistem Informasi*. 8(1). 871–946.
<https://doi.org/10.36706/jsi.v8i1.2229>.

Handayani, F., & Warsono, H. 2017. Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Karang Jahe Di Kabupaten Rembang. *Journal of Public Policy and Management UNDIP*. 6(1). 1–13. [10.14710/jppmr.v6i3.16543](https://doi.org/10.14710/jppmr.v6i3.16543)

Hartono. 2013. Pemanfaatan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk Penentuan Jenis Barang yang akan di Produksi. *Jurnal Media Infotama*. 53(9). 1689–1699. <https://doi.org/10.37676/jmi.v9i1.28>.

- Hedegaard Sørensen, C., & Paulsson, A. 2020. Contextualizing Policy: Understanding Implementation under Socio-technical Transitions. *International Journal of Public Administration* 43(12). 1055–1067. <https://doi.org/10.1080/01900692.2019.1665067>.
- Hilda AM, E. 2015. Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) pada Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Menggunakan Framework Laravel (Studi Kasus : Institut Sains & Teknologi Akprind Yogyakarta). *Jurnal SCRIPT*. 3(1). ISSN:2338-6304.
- Irawan, Y. 2018. Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Penerimaan Beasiswa Berbasis Web Sma Islam Darul Huda Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP). *Jurnal Ilmu Komputer*. 7(1). 1–6. [10.33060/JIK/2018/Vol7.Iss1.74](https://doi.org/10.33060/JIK/2018/Vol7.Iss1.74)
- Kurniawan, S., Sukristyanto, A., & Tjahjono, E. 2020. Evaluation of Public Policy of National Standard Education on Elementary School in Porong Sub-district, Sidoarjo District. *Journal of Public Policy and Administration*. 4(3). 42. [10.11648/j.jpaa.20200403.13](https://doi.org/10.11648/j.jpaa.20200403.13).
- Marcelina, M., Kalalo, K., Kimbal, M., & Kimbal, A. 2018. Implementasi Kebijakan Pembangunan Terminal Tatelu Di Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Eksekutif*. 1(1).
- Mening,Subekti dan Muslih Faozanudin, A. R.. 2017. Implementasi Program Bantuan Operasional Dasar Negeri di Kecamatan Tambak. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*. 3 (2). 58–71.
- Munthafa, A., & Mubarak, H. 2017. Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process Dalam Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Mahasiswa Berprestasi. *Jurnal Siliwangi*. 3(2). 192–201. ISSN 2477-3891.
- Perdana, N. S. 2019. Implementasi PPDB Zonasi Dalam Upaya Pemerataan Akses Dan Mutu Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Glasser*. 3(1). 78. <https://doi.org/10.32529/glasser.v3i1.186>
- Pritasari, L. A. K. B. 2019. Intervensi Aktor dalam Mempengaruhi Formulasi

- Kebijakan Lingkungan : Studi Kasus Kebijakan Relokasi Tambak Udang di Yogyakarta Actor Intervention in Influencing Environmental Policy Formulation : The Case Study of Shrimp Farming Relocation Policy in Yogya. *Jurnal Borneo Administrator*. 15(2). 179–198. <https://doi.org/10.24258/jba.v15i2.427>
- Putri, D. F. 2017. Analisa Stakeholder dalam Implementasi Kebijakan Kenangkulangan Kemiskinan Di Kota Madiun. *Universitas Airlangga*. 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.47828/jjanaasian.v9i1.56>.
- Rijal, F., Madani, M., & Fatmawati, F. 2013. Interaksi Aktor Dalam Perumusan Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Di Kabupaten Kolaka Utara. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 3(2). 14–26. <https://doi.org/10.26618/ojip.v3i2.66..>
- Saaty, T. L. 2004. Decision making - the Analytic Hierarchy and Network Processes (AHP/ANP). *Journal of Systems Science and Systems Engineering*. 13. <https://doi.org/10.1007/s11518-006-0151-5>.
- Sasongko, A., Astuti, I. F., & Maharani, S. 2017. Pemilihan Karyawan Baru Dengan Metode AHP (Analytic Hierarchy Process). *Informatika Mulawarman : Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer*. 12(2). 88. <https://dx.doi.org/10.30872/jim.v12i2.650>.
- Setiawan, B., & Nurcahyanto, H. 2018. Analisis Peran Stakeholders dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan Angka Kematian Ibu Studi Kasus Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. *Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*. 9(2). 127–144. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v9i2.27351>.
- Supriyanto, Purnaweni, H., & Widowati, N. 2014. Hubungan Komunikasi dan Sikap dengan Implementasi Kebijakan Pajak Reklame di Kawasan Simpang Lima Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*. 3(2). 327–332. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v3i2.5147>
- Takala, J. 2002. Analysing and Synthesising Multifocused Manufacturing Strategies by Analytical Hierarchy Process. *International Journal of Manufacturing Technology and Management*. 4(5). [10.1504/IJMTM.2002.001454](https://doi.org/10.1504/IJMTM.2002.001454).
- Wibowo, R. F., & Rostyaningsih, D. 2016. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

Semarang (Studi Kasus di Kecamatan Gunungpati). *Journal Of Public Policy And Management Review*. 5(4). [10.14710/jppmr.v5i4.12783](https://doi.org/10.14710/jppmr.v5i4.12783).

Wibowo, S. A. dan A. P. 2015. Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan sebagai Filter Penerima Beasiswa Menggunakan Model Analytical Hierarchy Process. *Jurnal Industri Inovatif*. 5(1). 45–52. E-ISSN: 2615-3866.

Wibowo, U. B. 2013. Intensitas Peran Aktor Kebijakan dan Kekuatan Politis Dalam Perumusan Kebijakan Sertifikasi Pendidik. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan*. 53(9). 1689–1699. <https://doi.org/10.21831/jpipfip.v6i1.4736>.

Yalia, M. (2014). Implementasi Kebijakan Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Sosial Media Tradisional Di Jawa Barat. *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*. 6(1). 149. <https://doi.org/10.30959/patanjala.v6i1.191>

Skripsi, Tesis dan Disertasi:

Fauzela, D. S. 2019. *Kerja Sama Pemerintah Swasta (KPS) sebagai Upaya Pengembangan Bandar Udara Radin Inten II Lampung Selatan*. Universitas Lampung.

Maliki, W. 2012. *Analisis Implementasi Kebijakan Kurikulum Seni Budaya Keterampilan di Sekolah Dasar Nasional 1 Bekasi Jawa Barat*. Universitas Indonesia.

Produk Hukum:

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 24 Tahun 2019 tentang *Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Provinsi Lampung*.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (PERMENDIKBUD) Nomor 14 Tahun 2018 tentang *Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah*

Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau Bentuk Lain yang Sederajat.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (PERMENDIKBUD) Nomor 17 Tahun 2017 tentang *Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat.*

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (PERMENDIKBUD) Nomor 20 Tahun 2019 tentang *Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan.*

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (PERMENDIKBUD) Nomor 51 Tahun 2018 tentang *Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan.*

Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Internet:

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. 2019. PPDB SMA Zonasi Reguler. <https://arsip.siap-ppdb.com/2019/lampung/#/030001/statistik>. diakses pada 17 Februari 2021 pukul 15.55 WIB.

Kemendikbud. 2018. Sistem Zonasi Strategi Pemerataan Pendidikan yang Bermutu dan Berkelas. [Publikasi.data.kemendikbud.go.id](http://publikasi.data.kemendikbud.go.id). diakses pada 16 Januari 2021 pukul 14:35 WIB.

Kemendikbud. 2020. Jumlah Data Satuan Pendidikan (Sekolah) per Kabupaten/Kota : Kota Bandar Lampung. referensi.data.kemdikbud.go.id. diakses pada 8 November 2020 Pukul 20.46 WIB.